

**PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK TERHADAP
FENOMENA POLITIK SAYAP KANAN INGGRIS 2014-2016: STUDI
KASUS REFERENDUM BREXIT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALIYA IMADUDDIN

14323062

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahrabbi'alamin

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk beberapa orang yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu Orang Tua Tercinta:

Alm. Abdul Halim Hasmar dan Anny Farichah

Terima kasih untuk doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada Al. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan membuka perjalanan baru bagi Al agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Ibu dan Bapak bahagia serta bangga. Penulis ingin membuktikan kepercayaan Ibu dan Bapak kepada Al untuk menyelesaikan sekolah sampai selesai dan satu tanggung jawab Al sebagai kakak sudah tercapai. Semoga Al bisa mencapai tanggung jawab lain serta Ibu dan Bapak senantiasa menemani, mendukung, dan percaya pada Al hingga akhir. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT.

HALAMAN MOTTO

“Love God, regardless of how you're feeling, (spiritually) and you will become a mountain. And mountains are not moved by storms.”

--Umar Faruq Abd-Allah--

“Know that the world is God’s gift, and that He needs nothing in return, and that your worship and gratitude are part of His gift to you. And if you realise how much He gives, and how little you deserve, you will never stop praising Him.”

--Timothy Winter--

“There is way too much pain in this world already for us to add to it. May God make us pain relievers.”

--Omar Suleiman--

“A fit body, a calm mind, a house full of love. These things cannot be bought - they must be earned.”

--Naval Ravikant--

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi, saran, masukan, dan rasa positif kepada penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Dan semoga dipermudah dan diberi kelancaran dalam melanjutkan studi S3 nya di manapun Bapak berada.
3. Ibu Gustri Eni Putri S.IP, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan terkait hal-hal menyangkut

perkuliahan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S., Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., dan Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A. selaku Dosen HI UII dan selaku Dosen Penguji Seminar dan Sidang Proposal, terima kasih untuk motivasi dan bimbingannya. Semoga Bapak dan ibu selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan banyak berbuat kesalahan. Semoga para Dosen-Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.

6. Mbak Mardiatul Khasanah S.Ak yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga untuk kenangan menyenangkan kita bersama, semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur panjang, dan lancar dalam segala urusan.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. Halim Hasmar dan Ibu Anny Farichah. Terima kasih untuk selalu percaya dengan Al untuk bisa menyelesaikan S1 ini sampai akhir. Terima kasih untuk motivasi dan kesabarannya menunggu Al hingga sampai di saat ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, umur panjang, dan bisa melihat Al bisa menjadi lebih dari ini suatu hari nanti.

8. Teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2014. Terima kasih sudah menerima dan mau merangkul saya sebagai salah satu bagian dari pertemanan kalian semua, nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, semoga kalian semua sukses selalu dimanapun kalian berada nanti, semua punya jalannya masing- masing untuk mencapai kesuksesan. See You on The Top!

9. Teman-Teman Markom FPSB UII, terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian. Teman seperjuangan, Teman makan, Teman Hidup yang tidak akan pernah meninggalkan keluarganya sendirian. Teman pertama dan selamanya sebagai calon pemimpin umat masa depan dengan caranya masing-masing. Semoga semuanya sukses terus dimanapun kalian berada nanti, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat bagi ummat. See You on The Top!

10. Teman-teman DPA Ibu Een, teman-teman AIESEC dan seluruh teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 5 tahun ini. Terima kasih telah menjadi tim dan partner terbaik.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

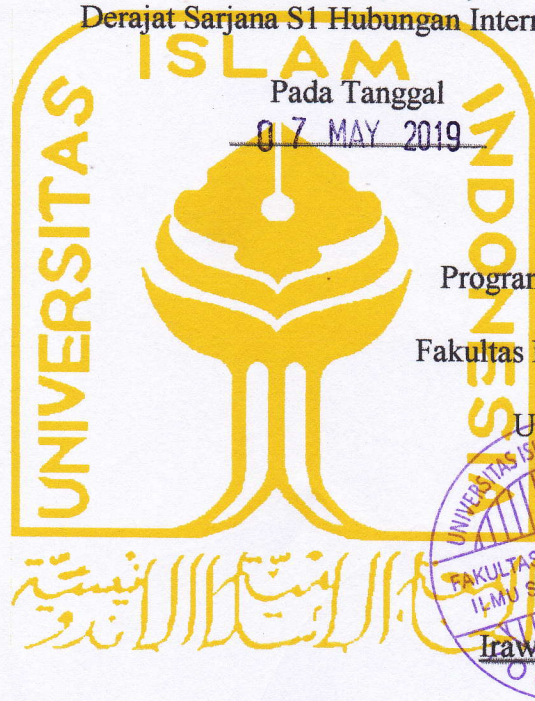
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2019

(Muhammad Aliya Imaduddin)

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK TERHADAP FENOMENA
POLITIK SAYAP KANAN INGGRIS 2014-2016: STUDI KASUS REFERENDUM
BREXIT

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

07 MAY 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

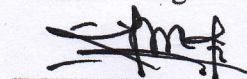
Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

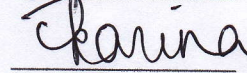
Dewan Penguji

1. Irawan Jati, S,IP.,M.Hum.,M.S.S
2. Enggar Furi Herdianto.,S.IP.,M.A
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

Tanda Tangan







PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 7 Mei 2019



Muhammad Aliya Imaduddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Signifikansi	6
I.5 Cakupan Penelitian	7
I.6 Kajian Pustaka	8
I.7 Kerangka Teori.....	12
I.8 Metode Penelitian	14
I.8.1 Jenis Penelitian.....	14
I.8.2 Alat Pengumpul Data	15
I.8.3 Proses Penelitian	15
BAB II : REAKSI SAYAP KANAN TERHADAP TITIK TEMU PERDEBATAN REFERENDUM BREXIT	17
II.1 Regulasi Hukum	18

II.2 Pengendalian Imigrasi.....	20
II.3 Kesepakatan Dagang.....	22
II.4 Iuran di Uni Eropa	24
II.5 Pengaruh di Uni Eropa	26
BAB III : FAKTOR EKONOMI DAN FAKTOR POLITIK	28
III.1 FAKTOR EKONOMI	28
III.1.1 Globalisasi	29
III.1.2 Perhatian Ekonomi.....	31
III.2 FAKTOR POLITIK.....	37
III.2.1 Multikulturalisme	38
III.2.2 Krisis Identitas	41
BAB IV..... : TITIK TEMU PROSES KEMENANGAN KUBU SAYAP KANAN DI DALAM REFERENDUM <i>BREXIT</i>.....	46
IV.1 Kedaulatan Negara	46
IV.2 Konservasi Bangsa	50
BAB V	58
KESIMPULAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Pasca krisis ekonomi 2008 pergerakan populisme menjamur di berbagai pemerintahan di dunia. Inggris tidak luput dari tren populisme yang ada. Sebagai negara yang sering mengedepankan kebijakan politik dalam menentukan arahnya Inggris berubah menjadi negara yang mengalami dalamnya politik identitas. Kemenangan kubu *leave* pada Referendum Brexit mengagetkan dunia. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa merupakan fenomena yang tidak serta merta terjadi secara singkat. Terdapat proses pembangunan yang direncanakan oleh politik sayap kanan dimulai dari tahun 2014. Kombinasi retorika politik dan ekonomi dalam menghadapi pengaruh yang ada selama menjadi anggota Uni Eropa merupakan kajian yang menarik di dunia *post-liberalism* pada saat ini.

Kata Kunci: Brexit, Sayap Kanan, Inggris, Globalisasi, Multikulturalisme

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tahun 2008 kondisi ekonomi sebagian negara di dunia khususnya negara-negara barat mengalami resesi dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua kuartel berturut-turut. Berawal dari kerugian usaha kredit perumahan di Amerika Serikat. Kerugian pada sektor tersebut menyebabkan uang penjualan rumah menjadi turun drastis dikarenakan jumlah utang kredit yang besar. Utang-utang dari kredit penjualan perumahan tersebut tidak dapat dibayar oleh perusahaan-perusahaan properti dan hal tersebut berdampak pada perekonomian konsumen (Casey, 2011, pp. 40-45). Pemilik-pemilik rumah yang tidak dapat membayar uang penuh akhirnya memilih untuk menjual rumah dengan harga yang menurun tajam dikarenakan inflasi. Inflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan properti tidak mendapatkan uang penuh yang seharusnya didapatkan dari penjualan rumah. Perusahaan-perusahaan tersebut mengalami ancaman kebangkrutan dan pada saat itulah pemerintah memberikan bantuan suntikan ekonomi berupa penutupan utang yang berbentuk pinjaman. Krisis ini dapat dianalogikan seperti efek domino. Berawal dari inflasi pegadaian rumah lalu menyebabkan krisis pasar global dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagian negara (Amadeo, 2018).

Ketika terjadi krisis ekonomi terdapat sebuah fenomena yang menjadi reaksi atas krisis yang ada. Berawal dari reaksi efek domino tersebut muncullah permasalahan ekonomi. Melalui permasalahan ekonomi muncullah permasalahan politik. Tanda kemunculannya adalah dengan menyalahkan salah satu pihak

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan dan tatanan masyarakat yang ada. Sering kali etnis minoritas yang dianggap bertanggung jawab dikarenakan perbedaan yang ada dengan etnis minoritas (Schaffer, 2006, pp. 401-419). Umumnya minoritas merupakan imigran dan dianggap oleh kelompok yang menentangnya sebagai penyebab ketimpangan ekonomi dikarenakan berkurangnya lapangan kerja. Begitu juga retorika lain yang mengelompokkan antara rakyat melawan kaum elite. Para elite dianggap sebagai tokoh politik atau korporat yang berbuat semena-mena terhadap rakyat umum (Ozimek, 2016).

Respons yang muncul setelah krisis selalu identik dengan mengambinghitamkan kelompok-kelompok tertentu sebagai sumber permasalahan yang ada. Muncullah populisme dan nasionalisme sebagai alat dalam menggerakkan dinamika roda politik terhadap permasalahan yang ada di masyarakat (Fukuyama, 2018, pp. 7-13). Bentuk dari populisme dan nasionalisme selalu beragam dikarenakan kondisi tiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing. Kelompok-kelompok yang menjadi kambing hitam bisa saja berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan mengikuti standardisasi sepihak mengenai siapa yang merupakan kawan dan siapa yang lawan (Hameleers, Bos, & de Vreese, 2017, pp. 870-900).

Kita dapat mempelajari hal tersebut melalui kekalahan kekaisaran Jerman di Perang Dunia Pertama. Nazi pada Perang Dunia Kedua menggunakan propaganda *Dolchstoßlegende* atau secara harfiah berarti ‘ditusuk dari belakang’. *Dolchstoßlegende* secara definitif merupakan sebuah propaganda anti semitik yang menggambarkan bahwa Jerman tidak mendapatkan kekalahan dari medan

perang secara langsung akan tetapi melalui pengkhianatan dari dalam yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Propaganda kambing hitam tersebut berakibat bangkitnya gerakan populisme-nasionalisme radikal yang menghasilkan fasisme Jerman dan munculnya perang dunia kedua (Evans, 2003, p. 150).

Pada masa ini pasca resesi ekonomi di tahun 2008. Gelombang pemimpin-pemimpin yang berhaluan populis-nasionalis di Eropa kembali bermunculan. Pemimpin-pemimpin populis dan nasionalis di Eropa memiliki sentimen yang sama dalam menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut merupakan akibat dari kurangnya kesadaran akan perlunya meningkatkan prioritas masyarakat kelas menengah ke bawah yang sekaligus juga merupakan mayoritas. Masyarakat mayoritas didominasi oleh kalangan kulit putih yang ingin dapat mengembalikan prioritas ekonomi, sosial, dan budaya kepada mereka. Kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya pada saat ini dianggap tidak memberikan ruang bagi mereka (Rader, 2006, pp. 189-388). Permasalahan-permasalahan tersebut secara garis besar adalah pembahasan identitas, kurang ketersediaannya lapangan kerja, penanganan imigran, peraturan mengenai perbatasan negara dengan pengungsi yang berdatangan dari daerah-daerah konflik, multikulturalisme, dan globalisasi. Keseluruhan krisis tersebut menyebabkan muncul reaksi bangkitnya populisme dan nasionalisme (Lochoki, 2017, pp. 40-45).

Sebagai contoh dinamika di Prancis melalui kepemimpinan Marine La Pen di partai sayap-kanan *Front National*. La Pen kalah oleh Emmanuel Macron pada ronde kedua pemilu Pemilihan Presiden Prancis tahun 2017 yang cukup sengit. Pada pemilu tersebut *Front National* di bawah La Pen menjadikan

etnonasionalisme sebagai pemahaman dasar dari bentuk gerakan populisme dan nasionalisme mereka (Albertazzi & McDonnell, 2008, pp. 166-180). Etnonasionalisme merupakan paham kebangsaan yang didasari dengan sentimen suku, ras, dan agama sebagai asasnya (Callahan, 2016). Kontras dengan dinamika yang terjadi di Prancis. Bentuk populisme dan nasionalisme di Jerman menempuh bentuk yang berbeda. Kelompok sayap kiri memegang kendali dari pergerakan yang ada. Fenomena di Jerman berbeda dengan negara-negara tetangganya di Eropa dikarenakan warisan trauma masa lalu. Sewaktu Nazi berkuasa kepemimpinan yang ada berbentuk sayap kanan. Bayangan masa lalu tersebut yang menyebabkan terdapat *glass ceiling* untuk berkembangnya pergerakan yang didasari oleh tendensi sayap kanan (Crossland, 2017). Melalui pergerakan sayap kiri oleh partai Sosialis-Demokrat yang merupakan warisan Jerman Timur. Fokus pemerataan ekonomi menjadi pembahasan inti dalam agenda politik (Albertazzi & McDonnell, 2008, pp. 119-134).

Perkembangan populisme dan nasionalisme di Inggris merupakan kombinasi yang unik antara retorika sayap kanan dan sayap kiri. Baik dari berbagai macam spektrum partai politik yang ada keseluruhannya menerapkan prinsip populisme dan nasionalisme yang berbeda dalam menyuarakan pendapat politiknya (Baggini, 2013, pp. 27-32). Fenomena populisme dan nasionalisme sudah mulai terlihat sejak resesi ekonomi tahun 2008. Beralihnya kekuasaan partai Buruh yang sudah lama memegang kendali ke tangan koalisi partai Konservatif-Liberal Demokrat pada pemilu di tahun 2010 sekaligus menjadi awal dari masa periode pertama kepemimpinan David Cameron merupakan bukti dari fenomena tersebut. Pada masa periode kedua kepemimpinan David Cameron

banyak muncul fenomena populisme-nasionalisme yang sama akan tetapi disegarkan dengan bentuk yang baru. Dimulai dari partai yang berlandaskan sayap kanan dan isolasionisme yaitu partai UKIP dengan Nigel Farage yang pada saat itu menjadi ikon pergerakannya. Lalu partai Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn berhaluan sayap kiri dengan agenda menyejahterakan *middle class*. Hingga partai Konservatif yang dipimpin oleh Theresa May dengan berlatarbelakang pemahaman politik sentris, konservasi, dan kestabilan.

Pada skripsi ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pengaruh permasalahan ekonomi dan politik yang menginisiasi tendensi politik sayap kanan dalam mempengaruhi masyarakat umum demi memperoleh hasil dari referendum *Brexit* yang diinginkan. Permasalahan yang menjadi dasar dari perdebatan di Inggris bersentral pada dua permasalahan. Keprihatinan ekonomi dalam menghadapi arus globalisasi dan konflik antara identitas dan multikulturalisme. Tentu saja kedua variabel tersebut sangat berkaitan erat dengan arus imigrasi, peraturan perbatasan, keanggotaan Uni Eropa, bea cukai, dan kesepakatan perdagangan (Albertazzi & McDonnell, 2008, pp. 181-197).

I.2 Rumusan Masalah

Penulis ingin menemukan jawaban dari bagaimana pengaruh dinamika faktor ekonomi-politik terhadap fenomena reaksi politik sayap kanan pada referendum *Brexit*. Dimulai dari tahun 2014 hingga puncaknya tahun 2016 yang menghasilkan kemenangan kubu *leave*.

I.3 Tujuan Penelitian

Melalui tinjauan kritis terhadap situasi politik-ekonomi pada tahun 2014 hingga 2016 di Britania Raya dengan terjadinya gelombang populisme dan nasionalisme. Penulis ingin menemukan keterkaitan antara faktor ekonomi di Inggris seperti imigrasi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan permasalahan yang berbentuk faktor politik seperti multikulturalisme dan identitas. Kedua permasalahan akan dijabarkan lebih dalam sebagai variabel yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dari struktur yang tertib kita dapat mendapatkan gambaran yang holistik mengenai permasalahan yang ada.

Sehingga pada akhirnya kita dapat menemukan benang merah antara faktor ekonomi dengan politik tanpa mengesampingkan satu dengan yang lain dan menjadi jalan munculnya hasil dari referendum *Brexit* dengan suara mayoritas memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

I.4 Signifikansi

Pembahasan mengenai keterkaitan antara referendum *Brexit* dengan populisme-nasionalisme di Inggris masih jarang dibahas. Berbagai jurnal yang tersedia secara umum bersentral pada pembahasan politik atau ekonomi secara terpisah seperti dalam beberapa jurnal sebagai berikut: *British Populism: The Labour Party and the Common Market Parliamentary Debate* (Lazer, 1976, pp. 259-277), *The rise of post-imperial populism: The case of right-wing Euroscepticism in Britain* (Gifford, 2006, pp. 851-869), *Left and right populism compared: The British case* (March, 2017, pp. 282-300). Keseluruhan jurnal tersebut membahas bagaimana bentuk dinamika politik-ekonomi secara praktis dan partisial dari pembahasan referendum *Brexit*.

Selain itu pembahasan yang sering diteliti belum membahas keterkaitan ekonomi-politik dengan populisme-nasionalisme. Permasalahan yang diangkat lebih banyak mengenai permasalahan normatif. Seperti dalam jurnal *Racial populism in England* (Thurlow, 2010, pp. 27-33). Dari hal tersebut penulis menyadari belum adanya pembahasan mengenai bagaimana cara melihat tren populisme-nasionalisme di Inggris melalui kaca mata ekonomi-politik secara holistik.

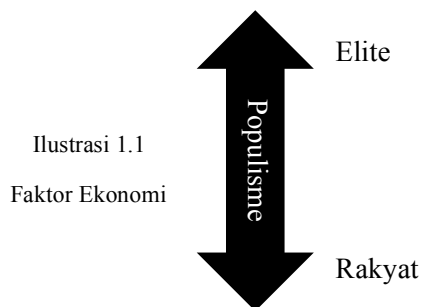
Munculnya kecenderungan masyarakat menganggap adanya sebuah sistem yang kurang cakap dalam menangani permasalahan globalisasi-multikulturalisme membentuk kebijakan politik yang bersifat populis-nasionalis menjadi tren. Skripsi ini akan menjawab pertanyaan dari bagaimana hasil dari referendum *Brexit* 2016 bisa terbentuk melalui faktor ekonomi-politik.

I.5 Cakupan Penelitian

Makalah ini masuk ke dalam kajian observasi situasi ekonomi dan politik di Inggris sejak tahun 2014 hingga 2016 pada masa administrasi Cameron periode kedua. Melalui cakupan tersebut kajian ini mempunyai tujuan menemukan keterkaitan antara faktor ekonomi-politik yang menyebabkan munculnya fenomena populisme-nasionalisme. Mengenai situasi ekonomi pembahasan yang akan muncul mulai dari isu seperti lapangan pekerjaan hingga imigrasi. Pembahasan yang akan muncul dalam membahas situasi politik mulai dari kembalinya politik identitas dan multikulturalisme. Keduanya akan membentuk sebuah dinamika yang puncaknya adalah menangnya suara pemilih *leave* di dalam referendum *Brexit*.

I.6 Kajian Pustaka

Referendum *Brexit* merupakan sebuah fenomena anomali di tengah globalisasi yang mengagetkan para ahli politik di seluruh dunia. Di luar dugaan melalui suara mayoritas. Publik Inggris memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dengan margin tipis. Sebanyak 52% memilih untuk *leave* dan sisanya sebanyak 48% memilih *remain*. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai belah pihak. Apa saja hal yang menginisiasi dari hasil referendum yang di luar perkiraan ini (Glencross, 2016, pp. 1-6). Penulis mengambil dua faktor utama yang menghasilkan kemenangan bagi kubu *leave*. Kedua faktor tersebut adalah faktor ekonomi dan faktor politik.



Faktor ekonomi dibentuk melalui ideologi populisme secara vertikal yang terjadi antara elite melawan rakyat dengan posisi elite di atas dan rakyat di bawah. Populisme merupakan sebuah filosofi pemahaman politik yang merujuk terhadap memperjuangkan hak dan kekuatan rakyat sebagai satu kesatuan melawan kelompok elite atau sebuah sistem yang dianggap merugikan rakyat. Dalam penerapannya populisme bisa berada dalam berbagai spektrum politik dari kiri hingga kanan tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada (Nolen, Munro, Gaur, & Ray, 2010). Populisme merupakan sebuah ideologi tipis yang

membutuhkan ideologi lain untuk menopangnya. Sering kali retorika nasionalisme bisa menjadi penopang ideologis dalam menggerakkan retorika yang direpresentasikan oleh populisme. (Mudde & Kaltwasser, 2017, pp. 1-20).

Berawal dari krisis ekonomi dunia tahun 2008 yang merupakan titik penting dalam pembahasan faktor ekonomi bagi fenomena populisme-nasionalisme di Inggris pasca 2010. Secara saksama kita mengetahui bahwa jarak antara krisis dengan pergantian kepemimpinan politik dari waktu resesi hingga pemilihan sangat singkat. Sebelumnya kepemimpinan yang dipegang oleh partai Buruh beralih kuasa menjadi di bawah koalisi partai Konservatif dan Liberal Demokrat. Jarak dua tahun merupakan waktu yang sangat dekat dan tentu saja berkaitan dengan keinginan masyarakat. Krisis ekonomi secara langsung mempengaruhi lengsernya administrasi Brown ke koalisi Cameron-Clegg (Casey, 2011, pp. 139-156).

Perhatian terhadap ekonomi semakin tinggi dikarenakan pengaruh globalisasi. Semakin canggihnya transportasi dan cepatnya pergerakan manusia menyebabkan imigrasi menjadi lebih mudah dibandingkan sebelum adanya globalisasi. Imigran yang datang ke Inggris mau mendapatkan upah yang lebih sedikit dari warga asli dan mau mengerjakan pekerjaan kerah biru. Masyarakat menengah ke bawah khawatir jika imigrasi tidak terkontrol maka lapangan pekerjaan akan semakin mengecil dikarenakan imigran. Selain perhatian dalam secara mikro tersebut pemerintah juga dituntut rakyat untuk bisa memiliki kebijakan ekonomi sendiri dan dapat memproteksi kepentingan internal masyarakat Inggris terlebih dahulu. Sepeti penegasan perbatasan, bea cukai, dan

reformasi berbagai kesepakatan perdagangan yang dianggap tidak memprioritaskan Inggris (Melchior, 2018, pp. 30-31).

Faktor politik dibentuk dari ideologi nasionalisme menggunakan pendekatan yang bersifat horizontal yang terjadi antara pemisahan orang dalam dan orang luar. Berbentuk horizontal dikarenakan yang dipermasalahkan adalah permasalahan yang bersifat sosial dan tiap individu secara kolektif mengalaminya (Mudde & Kaltwasser, 2017, pp. 1-20). Salah satu faktor penting dalam terjadinya populisme di Inggris adalah munculnya rasa nasionalisme. Dalam melakukan pembahasan terhadap tradisi nasionalisme Inggris. Terdapat istilah yang dikenal sebagai tradisi *communis patria* yang berarti patriotisme untuk negara kita bersama. Melalui *communis patria* terdapat tiga inti pembahasan yang akan membentuk bagaimana visi patriotisme Inggris. Melalui propaganda, *anglophile*, dan *constructive imperialism* membentuk *wider patriotism*. *Anglophile* merupakan rasa kecintaan terhadap nilai dan tradisi yang ada di Inggris sejak *magna charta*. *Constructive imperialism* merupakan pemahaman bahwa nilai Inggris harus menjadi nilai bersama di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang dan budaya. Pemahaman ini merupakan rujukan menyeluruh dalam memahami dasar pemahaman nasionalisme Inggris sebagai *host* ideologi populisme yang ada pada masa ini (Thompson, 2015, pp. 107-121).

Untuk memahami siapa orang luar dan orang dalam yang terdapat dalam dinamika politik referendum *Brexit*. Kita harus tetap mengaitkannya dengan situasi ekonomi antara elite politik dan rakyat. Tingkat elite politik di Inggris menggunakan sistem *First Past The Post* (FPTP) yang mempunyai penerapan untuk partai yang terpilih menjadi pemenang dari pemilihan umum memiliki kursi

mayoritas lebih dari 50% dari kursi parlemen (Goodwin & Milazzo, 2015, pp. 104-105). Melalui FPTP kemenangan kekuatan baru tertahan dikarenakan untuk memenangkan suara mayoritas harus memiliki kursi parlemen yang lebih banyak dibanding kursi parlemen dari pemerintahan yang dipegang oleh partai penguasa. Maka sering kali untuk melengserkan kekuasaan yang ada partai oposisi menjalin koalisi untuk menaikkan suara. Kita bisa melihat contohnya ketika Cameron-Clegg harus melakukan koalisi untuk bisa menggeser partai Buruh yang berkuasa pada pemilu 2010 (Albertazzi & McDonnell, 2008, pp. 181-197). Sistem FPTP memang seimbang dikarenakan akan menghalangi mudahnya pergantian kepemimpinan. Namun belajar dari pemilu tahun 2010 maka hal tersebut tidak terjamin. Ketika masyarakat merasakan adanya masalah di kalangan elite maka fenomena *Brexit* menjadi salah satu jawaban yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pemerintahan.

Sedangkan di tingkat rakyat muncul anggapan bahwa Inggris mengalami krisis identitas. Secara garis besar merupakan akibat dari terlalu cepatnya proses imigrasi yang ada sehingga muncul *crisis of entitlement* yang dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya kulit putih (Lester, 2011). Multikulturalisme dianggap selain merugikan ekonomi juga tidak baik bagi kelangsungan nilai-nilai dan budaya yang sudah ada di dalam masyarakat Inggris (Goulbourne, 1991, pp. 87-125).

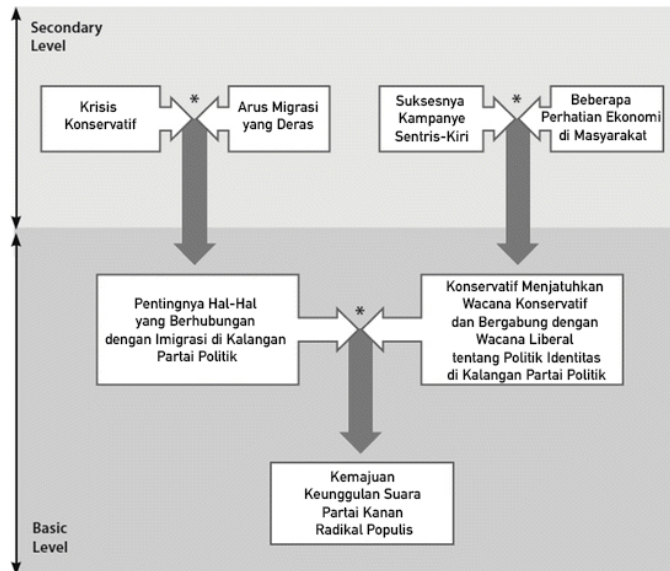
Ketika kedua faktor tersebut kita gabungkan maka kita akan menemukan variabel dari asal muasal bangkitnya sayap kanan di Inggris dan kemenangan kubu *leave* dalam referendum *Brexit*. Jalan politik kanan di Inggris memiliki berbagai spektrum dalam cara melakukan aspirasinya. Dimulai dari sentris kanan

hingga kanan radikal. Inti dari politik sayap kanan adalah keinginan untuk bisa mengonservasi nilai-nilai yang ada. Baik itu merupakan kekuatan ekonomi secara historis dikarenakan Inggris selalu merupakan kekuatan ekonomi yang berdikari bahkan sejak lenyapnya kejayaan Kerajaan Inggris (Stern & Wennerlind, 2014, pp. 31-34). Begitu juga secara politik dengan adanya keinginan untuk mempertahankan identitas dan norma yang dimiliki oleh Inggris (Soffer, 2009, pp. 19-23). Interaksi antara kedua variabel ini adalah keinginan untuk berdikari secara ekonomi dan mengonservasi nilai yang ada dari tradisi. Membentuk sebuah dinamika yang berbentuk populisme-nasionalisme versus globalisme-multikulturalisme.

I.7 Kerangka Teori

Skripsi memerlukan sebuah perangkat teori yang dapat menghubungkan antara berbagai variabel permasalahan satu dengan variabel permasalahan lainnya hingga kita mendapatkan hasil final dari penelitian yang kita teliti. Kita dapat menemukan asal-muasal permasalahan yang ada dan menstruktur logika dalam menemukan kesimpulan melalui variabel-variabel dari rumusan masalah penelitian kita.

Two level theory yang merupakan teori yang dirumuskan oleh Goertz & Mahoney dapat menjawab permasalahan tersebut. Dengan tatanan logika AND secara terperinci kita dapat menemukan pola berfikir yang runtut dan logis. Logika AND yang berarti ‘dan’. Sehingga variabel yang ada merupakan variabel yang berkaitan antara satu dengan yang lain. (Goertz & Mahoney, 2006, pp. 247-266).

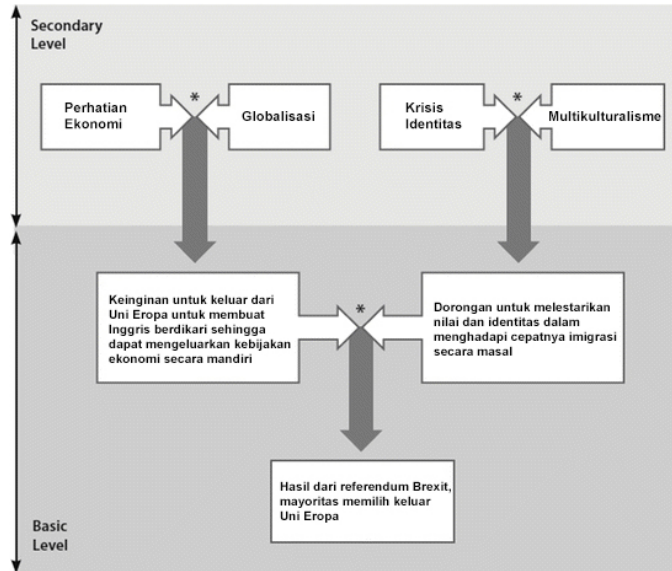


Gambar 1.3

Two level theory oleh Goetz-Mahoney digunakan oleh Lochoki (Sumber: Lochoki, 2017)

Sebagai contoh salah satu pengaplikasian dari *two level theory* dilakukan oleh Timo Lochoki dalam penelitiannya mengenai fenomena partai kanan radikal yang ada di Jerman. Melalui pengumpulan sampel variabel-variabel yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya bisa menemukan jawaban dari penelitiannya. Jawaban yang didapat juga bersifat sistematis dan runtut. Terdiri dari empat variabel yang berinteraksi masing-masing berpasangan hingga membentuk dua variabel yang akan dipertemukan dalam menjawab permasalahan yang ada. Pada penelitian referendum *Brexit* dengan melakukan penerapan tersebut. Kita dapat melihatnya lebih dalam dengan melacak penyebabnya secara sistematis. (Lochoki, 2017, p. 46).

Two level theory terdiri atas tiga tingkatan yang tersusun dalam: *secondary level* dan *basic level*. *Secondary level* mendeskripsikan sebab-akibat dari beberapa variabel yang menyebabkan variabel di *basic level*. *Basic level* mendefinisikan makna dari logika AND antar variabel sehingga dapat ditemukannya keterkaitan dan jawaban antara faktor politik dan faktor ekonomi (Goertz & Mahoney, 2006, pp. 247-266).



Gambar 1.4

Implementasi *Two level theory* terhadap *Brexit*

Variabel ekonomi terdiri dari permasalahan Globalisasi dan Perhatian Ekonomi. Globalisasi merupakan permasalahan yang bersifat eksternal dan Perhatian Ekonomi bersifat internal. Variabel politik terdiri Multikulturalisme dan Krisis Identitas. Multikulturalisme merupakan permasalahan yang bersifat eksternal dan Krisis Identitas bersifat internal. Dalam menjawab kerangka dari penelitian ini. Penulis mempertemukan variabel antar ekonomi dan politik dalam dinamika *Brexit* melalui logika AND.

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan bersifat analisis dan menggunakan riset yang deskriptif. Perspektif subjek seperti proses dan makna diutamakan. Landasan teori bertujuan untuk memberikan penjelasan umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori hasil penelitian.

I.8.2 Alat Pengumpul Data

Instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah melalui telaah pustaka. Pengumpulan data melalui sejumlah literatur sekunder baik berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan kata kunci dari topik yang akan penulis bahas seperti populisme, nasionalisme, resesi ekonomi, imigrasi, dan multikulturalisme.

Tempat-tempat yang menjadi rujukan penulis sebagai sumber informasi dan data dalam penelitian ini adalah:

1. Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri di Jakarta
2. Perpustakaan Muhammad Hatta Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
3. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
4. Perpustakaan Grhatama Pustaka di Yogyakarta

Selain dari tempat-tempat tersebut penulis juga mencari data melalui web melalui situs-situs yang memiliki data dan dokumen penting yang berkaitan dengan topik skripsi penulis seperti kanal pendidikan yang ada di internet.

I.8.3 Proses Penelitian

Proses penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dengan tujuan untuk memahami dan membentuk rangkaian narasi melalui berbagai asumsi menjadi sebuah deskripsi yang memiliki hipotesis runtut dan mudah dipahami (Cresswell, 2014, pp. 183-214). Adapun tahapannya dibagi menjadi empat bagian:

1. Pengumpulan Data

- Melalui data sekunder didapat melalui observasi, dokumen, materi audio-visual ilmiah yang bersifat ilmiah, dan berkaitan dengan subjek penelitian

2. Analisis Data

- Atur dan persiapkan data yang akan dianalisis
- Membaca data-data yang ada. Melalui tahapan ini penulis dapat menemukan makna dari informasi yang ada serta kesempatan untuk merefleksikan keseluruhan penelitian
- Klasifikasi data. Ambil bagian yang perlu setelah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai hal yang diteliti. Pisahkan antara deskripsi dan tema. Deskripsi bersifat subjektif sedangkan tema bersifat objektif.
- Hubungkan deskripsi dan tema antara satu dengan yang lainnya hingga bertemu sebuah titik antara situasi lapangan dan teori murni
- Menafsirkan temuan antara kombinasi deskripsi dan tema

3. Verifikasi Data

Setelah menemukan titik temu antara data tematis dan deskriptif dilanjutkan dengan melakukan pengisian data ke dalam penelitian

BAB II

REAKSI SAYAP KANAN TERHADAP TITIK TEMU PERDEBATAN REFERENDUM BREXIT

Dalam meneliti fenomena hasil dari referendum *Brexit* kita harus memahami bahwa Inggris mendapatkan pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Permasalahan dari luar sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dari internal masyarakat Inggris. Salah satu yang terlihat jelas adalah fenomena bergeraknya politik sayap kanan. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya reaksi sayap kanan terhadap permasalahan dari luar tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor inti. Faktor yang pertama adalah ekonomi dan faktor yang kedua adalah politik. Di dalam faktor ekonomi kita akan menemukan perhatian tinggi terhadap penempatan posisi Inggris di tengah ekonomi dunia dengan Uni Eropa yang semakin mengglobal. Bagi sayap kanan kesejahteraan dapat diraih jika mementingkan kebutuhan nasional terlebih dahulu. Institusi dari luar seperti Uni Eropa dianggap membuat Inggris tidak dapat leluasa dalam mengatur kebijakan secara mandiri. Sedangkan faktor politik bagi sayap kanan adalah permasalahan krisis identitas dengan penolakan terhadap multikulturalisme. Banyaknya imigran yang berdatangan di Inggris dianggap bertentangan dengan norma yang ada (Albertazzi & McDonnell, 2008, pp. 181-197).

Dari pemahaman sayap kanan terhadap solusi dari permasalahan globalisasi ekonomi dan penolakan masyarakat yang multikultural. Kita dapat menemukan keterkaitan di antara globalisasi dan multikulturalisme. Dalam melihatnya kita bisa membuat sebuah spektrum yang memudahkan kita dalam

memahami bagaimana kubu sayap kanan melihat permasalahan yang ada. Dimulai dari ekspansi globalisasi ekonomi Uni Eropa hingga isu multikulturalisme yang dibawa oleh kedatangan imigran. Terdapat lima poin faktor ekonomi-politik terkait dengan fenomena *Brexit*. Menurut Jeremy Cliffe (The Economist, 2016) berikut kelima faktor-faktor beserta reaksi dari sayap kanan terhadap poin-poin tersebut:

II.1 Regulasi Hukum

Regulasi Hukum dengan Uni Eropa kerap kali menjadi isu yang diangkat oleh bagi sayap kanan dan mencari celah agar dapat dimanfaatkan sebagai senjata politik. Bagi sayap kanan Uni Eropa merupakan simbol intervensi asing yang dianggap membuat Inggris tidak bisa membuat hukum bagi masyarakatnya sendiri. Isu yang sering diangkat merupakan isu yang bersifat keseharian dan dianggap menyentuh rakyat kecil.

Sebagai contoh mengenai luasnya kaca truk demi mencegah semakin banyaknya pesepeda yang menjadi korban tabrak lari. Solusi diberikan dengan memperluas jendela truk secara horizontal supaya menambah daya pandang. Boris Johnson dalam surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Luar Negeri Inggris dikarenakan tidak setuju dengan pendekatan lunak Pemerintahan May dalam Brexit menggunakan isu ini dibersamai dengan argumentasi bahwa pemerintahan Inggris harus meminta izin dahulu ke Brussels dan menunggu jawaban yang lama (Johnson, 2018).

Sedangkan salah satu bentuk lainnya yang diangkat dalam peraturan ekonomi yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Inggris adalah

mengenai regulasi nelayan. Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa memberikan seluruh negara Uni Eropa hak yang setara dalam mengambil ikan di wilayah laut Uni Eropa dan memasang kuota spesifik demi menjamin lestarnya ikan. Sebanyak 92% nelayan Inggris memilih untuk *leave*. Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa dinilai tidak berjalan dengan baik. Sebanyak 58% hasil ikan di wilayah perairan Inggris diambil oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Hal ini merupakan contoh isu proses birokrasi politik yang menyebabkan sebagian masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. (Dannreuther, Lavery, & Quaglia, 2018, pp. 1-4)

Terdapat perbedaan antara bentuk hukum Inggris dengan negara-negara lainnya di Eropa. Jika Inggris menggunakan hukum umum sebagai landasan konstitusinya maka Eropa menggunakan hukum sipil sebagai landasan dalam menjalankan sistem hukum. Hal ini membuat proses yang lambat dalam meratifikasi hukum antara pemerintahan di London dan pemerintahan supranasional di Brussels. Perbedaan mendasar antara hukum umum dengan hukum sipil dalam hal regulasi adalah konstitusi hukum umum bersifat tidak tertulis dan hukum sipil bersifat tertulis. Ketika Inggris terdaftar sebagai anggota Uni Eropa maka Inggris harus mengikuti *acquis communautaire* atau yang dikenal sebagai *EU acquis*. *EU acquis* merupakan sumber hukum sipil setebal 10.000 halaman tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum domestik Inggris statusnya berada di bawah *EU acquis* serta dalam perumusan dan penerapannya harus disetujui oleh parlemen di Strasbourg (Reddy, 2016).

Tradisi hukum Inggris adalah analisis permasalahan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa sehingga bentuknya fleksibel bukan

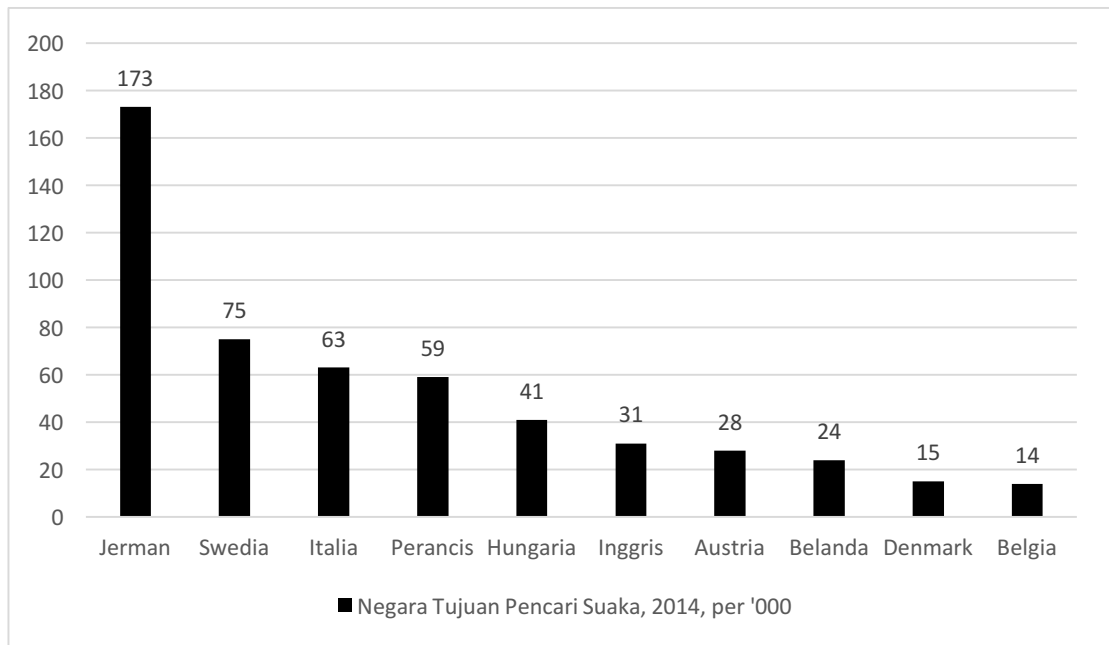
dengan kodifikasi peraturan tebal yang komprehensif. Dengan keluar dari keanggotaan Uni Eropa pemerintahan Inggris dapat mengembalikan kontrol tradisi peraturan-peraturan fleksibel dalam menyelesaikan persoalan internal yang bersifat urgen seperti mengenai urusan kesehatan, keamanan, dan ketenagakerjaan.

II.2 Pengendalian Imigrasi

Selain dominasi regulasi Uni Eropa, isu imigrasi juga mendapatkan perhatian tinggi bagi politik sayap kanan. Imigran dianggap merupakan permasalahan yang didapatkan dari keanggotaan Uni Eropa dengan masuknya pendatang dan benturan budaya sebagai konsekuensinya. Ketika intensitas imigrasi terlalu cepat maka masyarakat Inggris dianggap belum siap untuk bisa selaras dengan laju tersebut. Sehingga ditakutkan dapat membuat terjadinya krisis identitas. Terutama bagi yang ingin mengonservasi kultur Inggris. Negara bagi politik kanan dapat terbentuk melalui proses latar belakang budaya yang aman dan statis (Stone, 2016).

Kubu sayap kanan skeptis dalam melihat bagaimana Uni Eropa menangani isu imigrasi. Penanganan isu imigrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa memakan biaya yang besar serta arusnya tidak terkendali. Inggris sebagai anggota Uni Eropa tidak dapat mengatur dan memilih migran yang dapat berkontribusi kepada masyarakat Inggris dikarenakan pembagiannya harus melalui administrasi Uni Eropa. Ditambah dengan penanganan Uni Eropa terhadap terjadinya eksodus besar-besaran pengungsi dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah ke negara-negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut menjadi perhatian sayap kanan

Inggris terutama penanganan imigrasi di Jerman yang merupakan simbol kekuatan Uni Eropa.



Grafik 2.1

Infografik pencari suaka ke Uni Eropa (Sumber: The Economist, 2016)

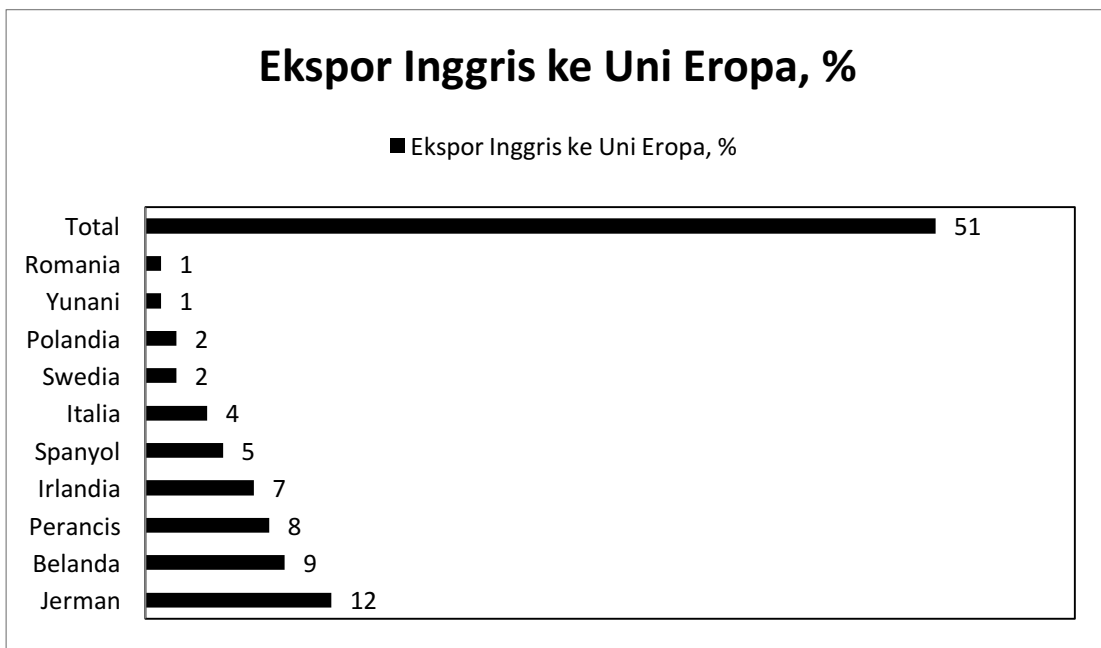
Bagaimana kemauan pemerintahan Jerman mau menerima imigran dengan jumlah yang banyak. Stigma negatif terhadap negara-negara yang identik dengan identitas Muslim pasca tragedi 11 September 2001 menjadi sarana munculnya antipati terhadap penanganan imigrasi yang diberikan terhadap mereka (The Economist, 2015).

Ketakutan sering kali berasal dari kurangnya pendidikan dan hal tersebut selaras dengan kurangnya informasi maupun interaksi budaya. Mayoritas kubu *leave* yang memilih untuk keluar dari 'jerat' peraturan imigrasi Uni Eropa berasal dari kalangan yang memiliki pendidikan rendah dan tidak memiliki kualifikasi formal pendidikan formal. Sedangkan mayoritas kubu *remain* berasal dari kalangan yang memiliki kualifikasi pendidikan formal (Speed, 2016).

II.3 Kesepakatan Dagang

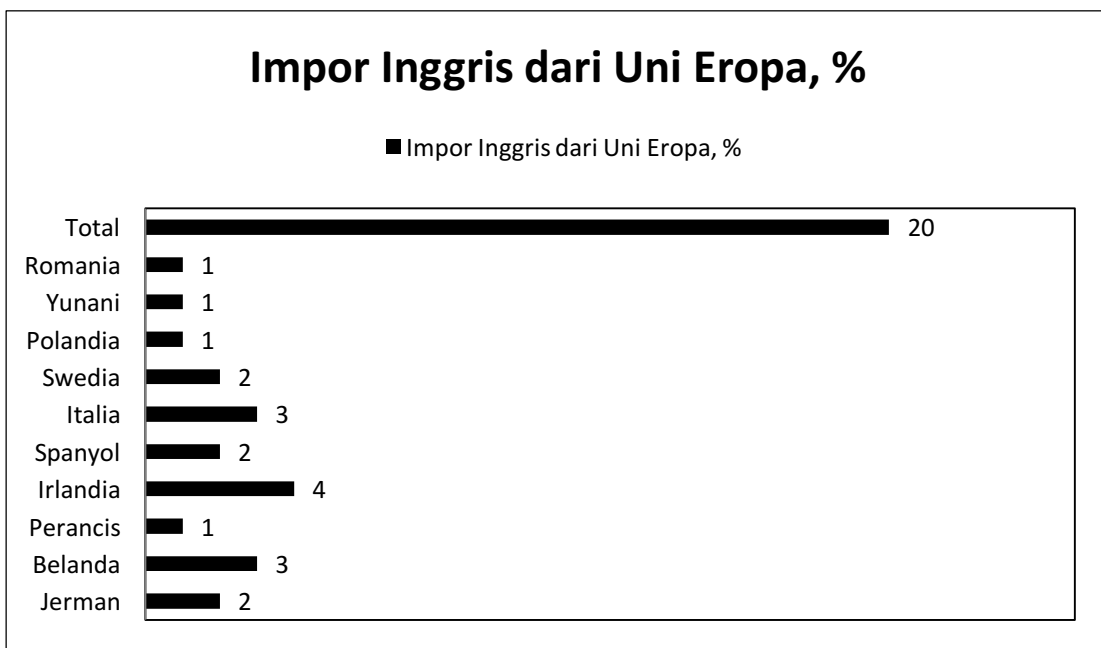
Menurut pandangan politik sayap kanan, Inggris dapat membuat perjanjian perdagangan dengan lebih leluasa jika keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Regulasi perdagangan hukum-hukum dagang Uni Eropa akan mengikat Inggris jika berada dalam keanggotaan Uni Eropa. Interaksi perdagangan antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa tetap dilakukan dengan kesepakatan dagang sesuai kepentingan terbaik bagi perekonomian Inggris. Sebenarnya jika berbicara mengenai kepentingan terbaik bagi perekonomian Inggris hal tersebut tentu saja berbeda pandangannya antara pola pikir politis tiap-tiap kubu politik. Akan tetapi kenyataannya sesuai dengan data sebanyak 51% ekspor Inggris masuk ke dalam Uni Eropa dengan Jerman sebagai penerima terbanyak dari nilai ekspor Inggris.

Berbanding terbalik dengan banyaknya nilai ekspor, Inggris hanya mengimpor sebanyak 20% dari Uni Eropa. Tentu saja secara data Inggris mendapatkan manfaat yang besar dari perdagangan dengan Uni Eropa jika melihat dari perbandingan antara nilai ekspor dan impor. Jarak antara 51% dengan 20% merupakan surplus yang besar dan sangat disayangkan apabila suntikan ekonomi tersebut harus ditata ulang (The Economist, 2016).



Grafik 2.4

Infografis persentase ekspor Uni Eropa ke Inggris (Sumber: IMF,2016)



Grafik 2.5

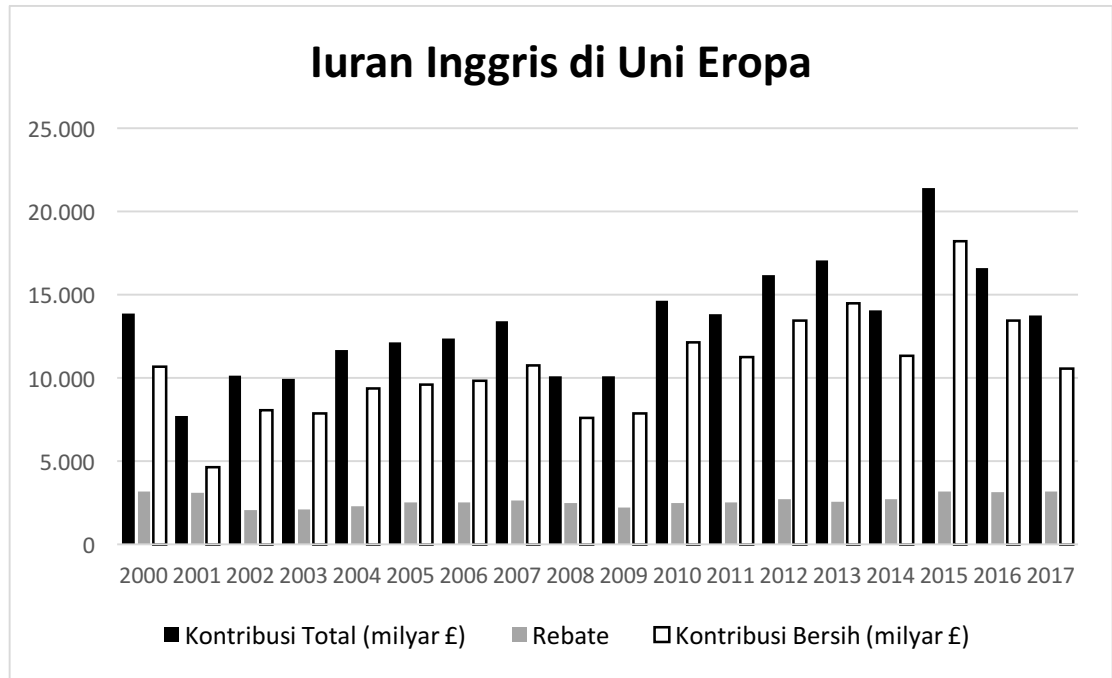
Infografis persentase impor dan ekspor Inggris ke Uni Eropa (Sumber: IMF, 2016)

Tentu saja ketika bebas dari aturan Uni Eropa Inggris dapat membuat kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain di dunia secara mandiri.

Namun negara-negara dengan kekuatan ekonomi sekaliber Amerika, Tiongkok dan India enggan jika memilih berdagang dengan Inggris dibandingkan dengan Uni Eropa dikarenakan regulasi bentuk perdagangan Inggris pasca *Brexit* belum jelas (Tobin, 2018).

II.4 Iuran di Uni Eropa

Inggris berkontribusi terhadap anggaran program-program di Uni Eropa dari tahun 2000 hingga 2016. Tiap tahun kontribusi Inggris terus meningkat secara bertahap. Isu pendanaan ini diangkat dalam kampanye referendum *Brexit*. Salah satunya adalah isu tiap minggunya Inggris mengirimkan £350 juta ke anggaran Uni Eropa yang di dalam kampanye kubu *leave* dibandingkan dengan anggaran pendidikan pemerintah (Bulman, 2016). Memang benar jumlah £350 juta tersebut setengah jumlahnya dari alokasi dana pendidikan dari pemerintah Inggris setiap tahun. Padahal jumlah £350 juta per minggu berasal dari dana tahun 2014 yang belum terkena *rebate* atau yang dikenal sebagai dana balik dari Uni Eropa. *Rebate* merupakan inisiatif diskon dari Brussels untuk pemerintah Inggris dengan harapan agar kerja sama bisa terus berjalan. Jika dana tahun 2014 sudah terkena *rebate* maka jumlahnya £275 per minggu (Full Fact Team, 2018).



Grafik 2.6

Grafik jumlah pengeluaran Inggris yang ditujukan untuk iuran anggota Uni Eropa tahun 2000-2017
(Sumber: EU Annual Report, 2016)

Untuk masyarakat yang kurang cermat akan melihat bahwasanya Inggris mengalami kerugian sejak lama dikarenakan Inggris memberikan suntikan dana lebih dari apa yang Inggris terima dari anggaran Uni Eropa. Akan tetapi tiap tahunnya jumlah nominal *rebate* terus bertambah demi memberikan kemudahan bagi pemerintah Inggris. Melalui sampel dari pendanaan Inggris terhadap Uni Eropa pada tahun 2016 kita dapat melihat dengan saksama bahwa setelah *rebate* tetap ada timbal balik secara tidak langsung dari *single market* dalam sektor ekonomi mikro seperti jasa tenaga ahli, surplus di sektor privat, bebas bea cukai, dan ekspor ekonomi.

II.5 Pengaruh di Uni Eropa

Pengaruh Inggris di tingkat pemerintahan supranasional Uni Eropa bagi sayap kanan atau bisa juga disebut sebagai pemilih *leave* dianggap sangat minim. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara Inggris dengan Uni Eropa sering mengalami pasang surut. Kontinental Eropa selalu berusaha dan berinisiatif untuk melibatkan Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa. Pasca ECSC (European Coal and Steel Community) Inggris lebih memilih fokus untuk mengurus negara-negara persemakmurnya dan tidak langsung menjadi anggota EEC (European Economic Community). Sebelum menjadi anggota EEC yang nantinya akan menjadi Uni Eropa, Inggris membuat EFTA (European Free Trade Association) yang beranggotakan lebih sedikit dibandingkan dengan EEC. Tetapi dikarenakan performa EEC yang bagus pada tahun 1973, Inggris bergabung menjadi anggota hingga saat ini. Kontinental Eropa merupakan mitra dagang yang esensial bagi perekonomian Inggris. Baik nantinya Inggris pasca *Brexit* berbentuk *soft brexit*, *chequers plan*, maupun *hard brexit* tetap Eropa akan menjadi mitra yang diperhitungkan oleh Inggris (UK in a Changing Europe Fellows, 2016). Bentuk detail kubu politik sayap kanan melihat permasalahan minimnya pengaruh Inggris di Uni Eropa dijelaskan secara ringkas dengan poin-poin sebagai berikut: kompleksnya regulasi hukum pada saat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan Inggris menggunakan hukum umum dan Eropa menggunakan hukum sipil, pengendalian batas negara beserta masuknya imigran oleh Uni Eropa yang dianggap kurang melindungi hak masyarakat Inggris, tidak mandirinya Inggris dalam melakukan kesepakatan dagang dengan mitra yang diinginkan, dan pengeluaran Inggris ke anggaran Uni Eropa yang secara matematis merugikan.

Maka solusi dari permasalahan tersebut dapat diubah jika Inggris berada di luar lingkaran Uni Eropa dan caranya adalah dengan memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada saat referendum terjadi.

Setelah memahami bagaimana retorika sayap kanan terhadap kelima poin esensial dari faktor ekonomi dan politik yang menjadi perdebatan dalam menghadapi referendum *Brexit* maka saatnya kita menerapkan *two level theory* demi mendapatkan variabel logika yang menyebabkan kemenangan pemilih *leave* di referendum *Brexit* 2016.

BAB III

FAKTOR EKONOMI DAN FAKTOR POLITIK

Setelah kita membahas mengenai kelima faktor yang menjadi inti dari dilema yang dihadapi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat referendum. Kita akan mengklasifikasi permasalahan-permasalahan yang ada menjadi sebuah variabel sederhana yang dapat mudah dipahami. Isu-isu seperti kedaulatan hukum, kontrol imigrasi, kesepakatan dagang secara mandiri, iuran yang dibayar secara rutin dan seberapa besar pengaruh yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama. Kedua faktor tersebut bisa mengelompokkan permasalahan yang ada secara garis besar melalui faktor ekonomi dan faktor politik.

Di dalam kedua faktor tersebut terdapat empat variabel yang berpasangan satu dengan yang lainnya. Pembahasan faktor ekonomi tersentral dari variabel globalisasi dan variabel perhatian ekonomi. Pembahasan faktor politik tersentral dari variabel multikulturalisme dan krisis identitas. Pertemuan variabel-variabel logika ini menempati tatanan *secondary level* dari rumusan *two level theory* yang mendeskripsikan sebab-akibat dari beberapa variabel yang menyebabkan variabel utama yang nantinya akan ditempatkan di *basic level*.

III.1 FAKTOR EKONOMI

Terdapat dua variabel yang menjadi inti dari pembahasan faktor ekonomi dari penyebab fenomena politik sayap kanan yang ada di Inggris beserta dampaknya secara langsung terhadap hasil dari referendum *Brexit*. Variabel yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena yang muncul pasca

tren nasionalisme usai. Interkoneksi antar negara-negara di dunia menjadi lebih mudah dikarenakan teknologi dan hal tersebut memberikan arus baru dalam tatanan hubungan internasional. Variabel yang kedua adalah perhatian ekonomi. Ekonomi menjadi isu yang penting dibahas dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah akibat kuantitatif serta empiris dari interaksi antara Inggris dengan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan sebuah sistem supranasional yang merupakan hasil dari proses dunia yang semakin mengglobal. Harapan dari masyarakat yang kontra terhadap kerja sama secara global adalah dengan mengembalikan tatanan sistem internasional di atas sistem global. Melalui hal tersebut diharapkan pemerintah dapat mengkonsolidasi kebijakan secara mandiri dan hal tersebut akan memudahkan aspirasi rakyat.

III.1.1 Globalisasi

Menurut kamus Merriam-Webster globalisasi memiliki definisi “Perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi yang ditandai terutama oleh perdagangan bebas, aliran modal bebas, dan penyadapan pasar tenaga kerja asing yang lebih murah” (Merriam & Webster, 1961). Liberalisasi mendominasi tata hidup global sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Jika pada masa perang dingin fokus perkembangan teknologi berada dalam bidang perkembangan senjata nuklir dan eksplorasi luar angkasa maka pada masa pasca perang dingin fokus teknologi diarahkan ke bentuk lainnya. Bentuk improvisasi dari perkembangan teknologi di era globalisasi fokus berpindah ke dalam proses meningkatkan teknologi komunikasi serta transportasi. Liberalisme menitik beratkan kepada kepentingan individual tiap manusia sehingga dalam perkembangannya teknologi difokuskan dalam perekonomian.

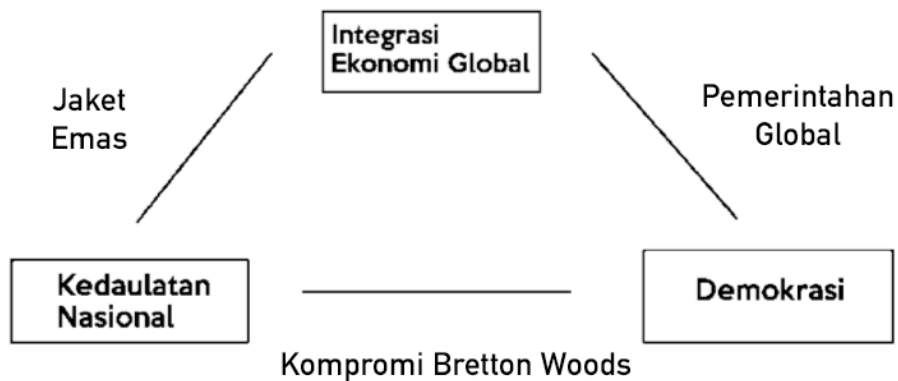
Krisis ekonomi di tahun 2008 memberikan dampak traumatis kepada masyarakat di negara-negara maju pada umumnya dikarenakan mereka yang paling terkena dampaknya. Inggris termasuk dari bagian negara-negara maju tersebut. Dari Krisis tersebut kita dapat belajar bahwa globalisasi bagi negara-negara berkembang seperti di Asia dan Afrika memang memberikan dampak yang positif. Akan tetapi memberikan dampak yang negatif bagi keberlangsungan dominasi negara-negara maju. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pasca krisis tersebut kita telah melalui fase pertama dari perkembangan globalisasi yang diberi istilah *first globalisation*. Keberlangsungan dari globalisasi dapat berevolusi menjadi fase selanjutnya antara negara-negara berkembang dan negara-negara mau dapat saling memahami satu dengan yang lainnya dan *Brexit*, yang merupakan simbol nasionalisme, isolasionisme, dan perlawanan terhadap globalisasi, merupakan salah satu proses ujian pendewasaan globalisasi ke arah fase berikutnya (Iyadjiev, 2016).

Interaksi antara perekonomian Inggris dengan Uni Eropa merupakan salah satu bentuk globalisasi. Selama Inggris menjadi anggota dari Uni Eropa kita melihat adanya kemudahan arus barang dan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam kesatuan Uni Eropa. Namun globalisasi tidak selamanya bisa dikatakan selalu bermanfaat bagi siapa pun. Tidak jarang banyak masyarakat Inggris yang termasuk dalam negara dengan perekonomian maju justru menerima kerugian dikarenakan berbagai faktor. Seperti dominasi peraturan Uni Eropa yang melakukan restriksi terhadap hasil alam baik dari pertanian maupun pemancingan ditambah dengan masuknya imigran secara masif menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi kalangan pekerja kerah biru

yang berasal dari masyarakat kulit putih Inggris. Regulasi tersebut dianggap bagi kaum nasionalis-populis tidak mementingkan kepentingan nasional dan terlalu terlibat dengan permasalahan di luar. Di tengah dunia yang berada dalam fase pendewasaan pasca *first globalisation* antusiasme rakyat kecil Inggris dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi menimbulkan keterkejutan dengan memilih untuk lebih protektif dibandingkan dengan terbuka pada saat hasil dari referendum *Brexit* keluar (Sampson, 2017).

III.1.2 Perhatian Ekonomi

Pengaruh dari luar turut mempengaruhi hasil dari referendum *Brexit*. Dalam mengaitkan bentuk perhatian ekonomi dan reaksi kubu sayap kanan terhadap berkembangnya globalisasi dari luar. Kita dapat menggunakan trilema politik ekonomi global atau yang dikenal dengan *Globalisation Trilemma*. Konsep ini terdiri atas tiga variabel yang hanya dapat diambil dua variabel saja ketika ingin diterapkan mengikuti arus globalisasi di dunia nyata (Rodrik, 2013).



Ilustrasi 3.1

Trilema Globalisasi

Kombinasi dari Demokrasi, Kedaulatan Nasional dan Integrasi Ekonomi Global di dunia nyata hanya dapat didapatkan jika kita memilih dua di antara ketiganya. Kita bisa mengombinasikan dua di antara tiga akan tetapi tidak bisa ketiga-tiganya keseluruhannya. Ketika ekonomi diintegrasikan secara global maka

transaksi lintas batas akan menjadi lebih mudah dikarenakan tidak adanya biaya bea cukai. Integrasi ekonomi mendalam tersebut akan menghilangkan salah satu sumber kedaulatan nasional yang esensial bagi negara-bangsa. Dengan kedaulatan nasional negara dapat mengatur regulasi ekonomi di perbatasan serta menciptakan biaya dalam masuk keluarnya barang ke dalam sebuah negara. Pertemuan antara regulasi bersifat supra nasional melawan regulasi yang bersifat negara berdaulat merupakan titik inti dari permasalahan yang dialami antara pemerintahan di London dan pemerintahan di Brussels. Antara satu dengan yang lainnya menganggap bahwasanya regulasi mereka merupakan solusi yang tepat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika Inggris memegang kendali bea cukai serta perbatasan maka rakyat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah akan mendapatkan keuntungan dan lapangan kerja yang lebih besar. Sebagai contoh dalam sektor perikanan dengan adanya pemisahan dari peraturan pemancingan Uni Eropa yang hanya membolehkan Inggris mengambil hasil 20% dari hasil alam perikanan. Ketika nasionalisasi ekonomi diberlakukan maka nelayan Inggris dapat mendapatkan hasil alam sesuai dengan regulasi yang inginkan secara lokal dan tentu saja dengan naiknya persentase pengambilan maka lapangan pekerjaan juga akan bertambah. Sektor alam lain selain dari sektor perikanan seperti sektor pertanian dan peternakan juga akan terkena dampak diterapkannya biaya bea cukai dengan keuntungan produk primer lokal. Jika keuntungan menengah ke bawah di Inggris dapat meningkat maka keuntungan yang bersifat makro belum tentu mendapatkan dorongan positif dari nasionalisasi ekonomi. Seperti industri manufaktur yang terdiri dari otomotif, penerbangan dan alutsista yang membutuhkan suku cadang dari berbagai negara agar dapat mendapatkan kualitas

yang bagus disertai dengan harga yang tepat. Umumnya sektor makro akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang bersifat global dan tanpa adanya restriksi bea cukai antar perbatasan negara.

Ketika kita menghilangkan demokrasi maka yang terbentuk adalah pemerintahan *Golden Straitjacket* yang berarti ketika ekonomi negara tersebut meningkat dan kondisi politik memburuk. Fenomena ini kita dapat temukan dari kemajuan ekonomi Tiongkok daratan. Ketika ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan hingga mendominasi pasar global. Keadaan yang bertolak belakang dengan situasi demokrasi yang ada dengan contohnya adalah ketatnya restriksi sosial media di Tiongkok hingga pembersihan etnis Uighur di Xinjiang. Tentunya situasi di Inggris berbeda dengan situasi di Tiongkok.

Terdapat beragam solusi dari trilema globalisasi. Salah satunya adalah dengan federalisme global yaitu dengan menyelaraskan politik demokrasi yang diglobalisasikan dan pasar global. Sedangkan solusi lainnya adalah dengan tetap menggunakan konsep negara-bangsa akan tetapi dengan mengedepankan integrasi internasional dan bukan hanya mementingkan kepentingan domestik. Kita dapat melihat inti dari perdebatan mengenai ekonomi antara Inggris dan Uni Eropa dari kedua solusi tersebut. Bagi kalangan populis-nasionalis melihat bahwa integrasi politik dengan pasar secara inklusif akan menyebabkan hilangnya kontrol terhadap kepentingan domestik. Jika kita menghilangkan kedaulatan nasional maka akan terbentuk pemerintahan global seperti yang berusaha diterapkan oleh Uni Eropa. Walaupun Inggris dan Eropa memiliki kultur dan sejarah yang tidak jauh berbeda tetap mengalami hambatan dibuktikan dengan adanya *Brexit*.

Perdebatan mengenai penting atau tidaknya konsep negara-bangsa merupakan percakapan yang menarik mengingat terdapat kelebihan dan kekurangan baik yang pro dan kontra terhadap penting tidaknya pemerintahan global. Terakhir jika integrasi ekonomi global dihilangkan maka yang terjadi adalah kembalinya sistem Bretton Woods dengan negara memegang kontrol penuh terhadap perdagangan antara publik internasional dengan domestik. Fenomena *Brexit* merupakan sebuah bentuk dari pengusahaan hal tersebut.

Di dalam kalangan yang memilih untuk *leave* juga terdapat berbagai versi dalam mengusahakan bentuk final dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Secara garis besar terdapat tiga bentuk aspirasi yaitu *hard Brexit*, *soft Brexit* dan *chequers deal*. *Hard Brexit* merupakan gagasan aspirasi atas kelanjutan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dengan tatanan administratif yang ingin benar-benar lepas dari Uni Eropa dan berdikari (Herszenhorn, 2018). Ditunjukkan dengan diadakannya tarif bea cukai kembali untuk segala produk yang masuk ke Inggris. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas anggota parlemen dari partai Konservatif dengan Jacob Rees-Mogg sebagai ikon dari aspirasi ini. Berbagai bentuk aspirasinya mendetail sehingga sebagai contoh paspor yang dimiliki oleh rakyat Inggris harus berbeda dengan paspor dari Uni Eropa termasuk warnanya. Sejak 1988 Inggris mengganti warna paspornya menjadi merah mengikuti keumuman warna paspor dari negara-negara anggota Eropa dan Inggris diproyeksikan akan diganti menjadi warna biru pasca *Brexit*. Selain hal yang bersifat sekunder, *Brexit* akan juga berdampak kepada urusan administratif yang bersifat primer dikarenakan berkaitan dengan keberlangsungan Inggris ke depan.

Persoalan seperti pasar tunggal beserta regulasi serikat pabean dan hukum dengan Uni Eropa akan diputus dari Inggris jika mengikuti skenario *hard Brexit*. Bagi kubu sayap kanan hal ini positif dikarenakan Inggris dapat mengembalikan kontrol terhadap perbatasan negara sepenuhnya ke pemerintahan di London. Jika aspirasi ini ingin terlaksana maka selain dari mayoritas anggota parlemen harus setuju begitu juga harus selaras dengan persetujuan Uni Eropa.

Sedangkan *soft Brexit* merupakan sebuah bentuk kompromi dari sistem Bretten Woods dan pendapat ini merupakan solusi dari partai Buruh yang dipimpin Jeremy Corbyn dengan menekankan kerja sama dengan Uni Eropa tetap berjalan dan tidak banyak sistem yang diubah selain status Inggris keluar dari Uni Eropa (Helm, 2018). Sistem seperti dengan pasar tunggal dan regulasi serikat pabean tetap akan sama seperti sebelum keluarnya referendum *Brexit*. Perbedaannya dengan *hard Brexit* adalah sektor ekonomi makro akan terjamin prosesnya. Seperti sektor manufaktur yang terdiri dari industri otomotif, penerbangan dan alutsista yang akan tetap sama efektivitas tarif bea cukainya dengan sebelum keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Inggris dengan *soft Brexit* tetap dapat mendapatkan suku cadang dengan kualitas dan harga yang tepat dibandingkan jika mengikuti skenario *hard Brexit*. Di dalam perhitungan ekonomi *hard Brexit* yang mayoritas pendukung berasal dari sayap kanan dengan haluan populis-nasionalis. Ekonomi yang dilihat merupakan ekonomi yang bersifat lokal dan mikro seperti contohnya adalah produk pangan. Melalui *hard Brexit* produk lokal petani bisa terjamin harganya dari persaingan produk pertanian yang datang dari luar Inggris.

Salah satu poin yang menjadi sasaran celah dari aspirasi *hard Brexit* dari kubu sayap kanan terhadap politisi oposisi dari *soft Brexit* seperti yang berasal dari partai Buruh, partai Liberal-Demokrat dan sebagian anggota partai Konservatif adalah ketika Inggris memilih untuk mengikuti *soft Brexit* maka Inggris tidak dapat memiliki pemerintahan demokratis secara independen. Begitu juga dalam melakukan negosiasi dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa yang memiliki kekuatan ekonomi seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan India dan tetap harus mengikuti regulasi serikat pabean di bawah Uni Eropa. *Soft Brexit* selain bentuknya tidak aplikatif dikarenakan jika Inggris keluar dari Uni Eropa tentu saja tidak akan semudah itu dalam menjalin kerja sama kembali dengan Uni Eropa. Bentuk solusi ini juga merupakan hasil abstrak dari partai Buruh sebagai reaksi partai oposisi atas pemerintahan.

Chequers deal merupakan solusi dari perdana menteri pada masa transisi menuju *Brexit* dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat menyeimbangkan antara *soft* dan *hard Brexit* (Barker, 2016). Dalam aspirasi regulasi pasar tunggal misalnya. Inggris akan tetap mengikuti ketentuan *common rules* dari Uni Eropa akan tetapi Inggris menginginkan keleluasaan dalam menjalin perdagangan dengan negara-negara mitra dagang di luar Uni Eropa. Pada saat yang sama pemerintah Inggris ingin memperketat regulasi migrasi dan menghentikan *free movement* bagi masyarakat antara Inggris dan Uni Eropa. Sehingga *chequers deal* dapat disimpulkan adalah dengan menjamin keinginan Inggris untuk bisa mempunyai perjanjian dagang secara leluasa secara internasional, mengontrol migrasi, dan tidak diperlukannya perbatasan secara fisik bangunan. Serta menolak

perjanjian dagang yang dianggap merugikan, migrasi tanpa kontrol, dan pembangunan perbatasan secara fisik bangunan.

III.2 FAKTOR POLITIK

Setelah faktor ekonomi kita akan memasuki faktor politik. Politik dan ekonomi ibarat dua sisi dalam satu keping koin yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga antara globalisasi dengan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan variabel pertama di dalam faktor politik. Multikulturalisme diakibatkan oleh globalisasi melalui semakin mudahnya intensitas perpindahan manusia dan budaya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terdapat berbagai hal yang bisa menyebabkan hal tersebut bisa terjadi seperti sejarah maupun dorongan ekonomi.

Kita akan mudah menemukan berbagai budaya yang terdapat di seluruh dunia bertemu di dalam satu tempat. Muncullah variabel kedua di dalam faktor politik ini yaitu krisis identitas. Inggris sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan utama dalam migrasi dikarenakan faktor ekonomi terasa begitu cepat. Wajah Inggris berubah begitu cepat dalam waktu kurang dari satu dekade dengan munculnya berbagai budaya disertai semakin tingginya permintaan untuk bentuk masyarakat yang inklusif. Bagi beberapa kalangan hal tersebut dilihat sebagai hal yang terlalu cepat. Keengganan minoritas untuk berasimilasi dengan menjadikan *British values* menjadi nilai bersama menjadikan hal ini sebagai sebuah isu politik yang dilihat dalam menentukan hasil dari referendum *Brexit*.

III.2.1 Multikulturalisme

Menurut kamus *Oxford* multikulturalisme memiliki arti “kehadiran, atau dukungan untuk kehadiran, beberapa kelompok budaya atau etnis yang berbeda dalam masyarakat” (Oxford Dictionary, 1989). Perdebatan mengenai bagaimana Inggris seharusnya mengatur sisi sosial kemasyarakatan termasuk merupakan tren yang hangat di publik Inggris pasca 2014 hingga saat ini pasca keluarnya hasil referendum *Brexit*. Selain dari perlunya Inggris mengeluarkan kesadaran baru dalam bernegara atau yang disebut sebagai *new-national consciousness*. Dalam pandangan *new-national consciousness* narasi kolonial bersifat retrogresif dan tidak progresif demi kemajuan bernegara. Dari titik tersebutlah muncul *common responsibility* untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kemajuan (Goulbourne, 1991, pp. 234-242).

Multikulturalisme merupakan istilah yang mencuat setelah semakin canggihnya transportasi dan cepatnya pergerakan manusia. Secara singkat multikulturalisme merupakan sebuah kondisi sosial yang diisi oleh beragam budaya dalam lingkup yang sama. Multikulturalisme dalam teori politik dengan praktik politik berkaitan dengan ideologi liberalisme. Berbagai isu kontemporer yang dibahas oleh liberal sangat banyak kaitannya dengan istilah multikulturalisme akan tetapi istilah tersebut juga digunakan oleh kubu non-liberal.

Multikulturalisme juga bisa disamakan dengan pluralisme jika masuk di dalam pembahasan ruang lingkup liberalisme. Terdapat dua macam bentuk dari pluralisme dengan ketiga tokoh yang menjadi sumber referensi pluralisme barat yaitu Vico, Montesquieu, dan Herder. Vico dan Montesquieu melihat Eropa

sebagai mercusuar peradaban universal dan Herder menganggap bahwa budaya merupakan bentuk dari reaksi manusia terhadap lingkungan. Bagi Herder bangsa Eropa bukanlah obor bagi peradaban universal dan budaya merupakan hasil genetik yang generik bisa melakukan interaksi satu dengan yang lain. Poin yang perlu ditambahkan adalah pentingnya kemurnian generik bagi Herder. Untuk bisa melestarikan budaya tentu saja dibutuhkan sebuah ekosistem budaya yang sama, Perbedaan antara pendapat Herder dengan multikulturalisme yang dianut oleh kalangan modernis adalah bagi kalangan modernis multikulturalisme merupakan perjuangan kelas antara tradisi kolonialisme dengan bangsa-bangsa non kulit putih (Parekh, 2002, pp. 50-75).

Negara modern adalah sebuah ruangan terbaik bagi multikulturalisme melalui dialog antar budaya. Sehingga dalam mengambil jalan penyelesaian selalu mengambil jalan tengah di antara prinsip universal dan supremasi dengan menekankan pada nilai-nilai moral. Negara dapat menyelesaikan masalah dari makro hingga mikro dengan cara merekonstruksi konsep bentuk dari negara modern. Dalam pembentukannya diawali dengan negara menemukan identitas homogeni di tengah multikulturalisme dan akhirnya terbentuk bangsa yang berdiri atas nilai-nilai yang koheren dan homogeni antara budaya yang ada di dalamnya (Thompson, 2015, pp. 107-121).

Multikulturalisme merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi fenomena rasisme kontemporer yang sering kali digunakan sebagai narasi politik. Isu rasis sering kali diciptakan dan dihilangkan sesuai dengan tren yang ada di masyarakat dan jika dianggap tidak relevan dihilangkan dari pembahasan. Selain itu dalam

politik kontemporer rasisme sering kali ditolak dan juga diproduksi secara bersamaan.

Terdapat perbedaan mendefinisikan multi kultural dengan multikulturalisme. Pendefinisian multi kultural dilihat dari segi kata sifat dan multikulturalisme dilihat sebagai unsur substantif. Multi kultural berisi fakta bagaimana budaya yang ada dari setiap komunitas dan multikulturalisme lebih kepada bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi budaya yang ada. Pemerintah dalam mengatur interaksi antara objek dengan hukum yang ada selalu mengalami perkembangan yang berbeda. Pada masa lalu definisi multikulturalisme berbeda dengan multikulturalisme yang sekarang. Jika pada masa lalu multikulturalisme identik dengan pemisahan antara komunitas satu dengan lainnya maka multikulturalisme pada masa ini berbeda. Kata kunci multikulturalisme pada masa kini adalah solusi integralis atau solusi komunal (Aughey, 2001, pp. 153-167).

Pendapat integralis melihat solusi komunal seperti yang diajukan oleh multikulturalisme klasik yang dianggap merupakan solusi anti-rasisme justru memberikan peluang akan adanya diskriminasi. Ketika integralis melihat susunan masyarakat dianggap tidak memberikan ruang bagi minoritas. Solusi komunal membagi masyarakat sesuai dengan nilai yang koheren masing-masing dan memisahkannya atas dasar nilai yang dianut. Metode integralis menjadi konseptor kenegaraan adalah elemen politik dan hukum Inggris dengan *British values*. Inti dari ide yang dibawa oleh integralis adalah Inggris harus menghadap ke masa depan dan menerima multikulturalisme dengan menjadikan nilai Inggris menjadi sentral dalam pemerintahan bukan hanya opsional saja. Melalui jalur integrasi

susunan masyarakat tidak terbagi melalui komunitas akan tetapi disatukan melalui nilai yang sama (Pitcher, 2009, pp. 163-177).

III.2.2 Krisis Identitas

Isu imigrasi menjadi salah satu topik tren dari sentral perdebatan dalam parlemen Inggris setelah keinginan independennya hukum dan regulasi pemerintah Inggris atas aturan Uni Eropa. Menariknya kita dapat menemukan bahwa keduanya menggunakan elemen yang sejalan. Kubu populis-nasionalis Inggris melihat regulasi Uni Eropa dan kedatangan migran sebagai sistem dan orang asing dari nilai-nilai yang dianut oleh tradisi yang ada di kepulauan Inggris. Padahal salah satu tantangan yang dijumpai oleh negara-negara barat pada masa ini adalah kekosongan *zeitgeist*. *Zeitgeist* memiliki arti “iklim intelektual, moral, dan budaya umum dari suatu era” (Merriam & Webster, 1961). Negara barat mengalami kekosongan inti dari identitas yang menjadi inti dari budaya dan ikatan sosial yang menjadi fondasi masyarakat. Iklim kekosongan bentuk tradisi dan budaya yang ada di barat pada masa kini merupakan hasil dari integrasi ekonomi global dan politik liberal.

Pada dekade 1910-an bentuk iklim inti kultural berbentuk *Victorian morality* masih terlihat yang dilanjutkan dengan generasi yang mengalami perang dunia pertama pada dekade 1920-an dan 1930-an pada saat terjadinya *Great Depression* yang menyebabkan iklim tren yang ada berpusat pada restorasi ekonomi. Lalu pada tahun 1940-an dengan bangkitnya ideologi politik fasisme di Eropa menyebabkan munculnya dekade yang diisi oleh generasi yang mengalami perang kembali. Lalu pada dekade selanjutnya dari 1950an hingga 1990an tiap dekadanya memiliki unsur khas *pop culture* yang menjadi *zeitgeist* bagi Barat.

Hingga datang peristiwa 9 September 2001 yang mengubah tatanan yang menjadi inti dari bentuk peradaban Barat.

Jika sebelumnya mengarah pada pola konsumerisme yang tersentralisasi oleh satu budaya berupa media massa yang diatur oleh beberapa kaum elite. Pasca runtuhnya gedung *World Trade Center* pada tahun 2001 pola konsumerisme berubah menjadi tidak hanya dalam arah seni saja akan tetapi ke arah politik. Dominasi politik liberal di dunia *occident* yang bersentral pada elemen ekspresi individu membentuk sebuah fluiditas sehingga tidak adanya yang menjadi sentral inti dari *zeitgeist* yang ada. Bagi kalangan yang ingin mengonversi nilai-nilai *greco-roman* yang sudah ada maka hal ini cukuplah serius. Mengingat ketika sebagai contoh kita mengambil budaya peradaban di *orient* seperti Indonesia, India, dan Jepang. Masyarakat masih memiliki nilai yang menjadi inti budaya walaupun di tengah munculnya arus monokultur yang dibawa oleh liberalisme barat menyebabkan munculnya reaksi dari politik sayap kanan baik yang sentris hingga radikal. Salah satu perbedaan diskursi antara politik kanan dan politik kiri adalah sayap kanan ingin mempertahankan nilai yang sudah ada di masyarakat dan mengembangkannya sesuai dengan keadaan dengan tetap mengikuti nilai yang ada. Bagi sayap kiri inti dari diskursi politik adalah perubahan adalah pergerakan budaya melalui integrasi sehingga muncul bentuk yang baru (KnowledgeHub, 2018).

Terdapat perbedaan prinsip antara prinsip komunitas atau integralis dalam memandang masa depan tatanan dunia global dan multikulturalisme. Sering kali politik sayap kanan memegang jalan komunitas dan politik sayap kiri memegang integralis. Banyaknya pergerakan manusia yang menuju Eropa menjadi sebuah

tantangan bagaimana bentuk Eropa di masa depan. Berbeda dengan bagian lainnya dari dunia. Eropa di tengah kosongnya kultural *zeitgeist* pasca liberalisme harus menerima banyaknya manusia yang datang dari berbagai belahan dunia. Faktor kemajuan ekonomi dan fasilitas yang dimiliki bangsa Barat merupakan sebagian faktor yang mempengaruhi banyaknya migrasi yang terjadi. Selain itu terdapat faktor lainnya seperti dikarenakan perang ataupun konflik bersenjata dari negara asal para migran. Iklim multikultural yang umum saat ini terbentuk dari kecenderungan ke arah integral dibandingkan komunal menyebabkan banyak penduduk asli Eropa terutama yang ingin mempertahankan tradisi *greco-roman* merasa didiskriminasi.

Brexit merupakan sebuah simbol dari usaha untuk mempertahankan nilai komunal *Britishness* di tengah dominasi pemahaman monokultur liberal di dunia internasional. *Brexit* di dunia pasca-liberalisme bisa menjadi mercusuar bagi dua kemungkinan. Bisa menjadi sebuah titik kebangkitan dari bentuk tatanan dunia global atau justru kembalinya dunia ke arah konsep negara-bangsa. Ditambah Uni Eropa belum mengeluarkan kebijakan yang jelas mengenai peraturan imigrasi. Ketika seseorang mengajukan diri untuk melakukan imigrasi di negara yang peraturannya lebih longgar dan diterima maka bisa berpindah ke negara yang lebih rumit kebijakan menetapnya seperti Inggris dikarenakan aturan *free movement* yang dimiliki Uni Eropa.

Kewarganegaraan Uni Eropa yang muncul sejak perjanjian Maastricht tahun 1992 pada awalnya ditujukan bagi pekerja ekonomi dan memudahkan pergerakan agen ekonomi antara negara-negara anggota Uni Eropa. Setelah berjalannya waktu Uni Eropa berkembang menjadi institusi supra nasional yang

membawahi negara-negara anggotanya baik dari persoalan ekonomi dan politik termasuk Inggris. Semakin lama perbedaan antara residen buruh kerja dengan residen yang menetap lama tidak dapat dibedakan. Diikuti dengan partisipasi oleh para perwakilan legislatif dari negara anggota di parlemen Uni Eropa dengan semakin menurunnya partisipasi politik dan dalam meratifikasikan kebijakan dari Inggris harus diratifikasikan oleh Uni Eropa.

Hasil dari referendum *Brexit* juga merupakan sebuah bentuk munculnya nasionalisme baru yang dapat juga dikatakan sebagai nasionalisme oleh kalangan mayoritas. Nasionalisme baru tersebut merupakan reaksi atas tidak berimbangannya yurisdiksi yang diterapkan oleh Uni Eropa dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kalangan mayoritas di Inggris. Kalangan mayoritas merupakan penduduk yang tidak hidup di kota yang multikultural seperti London akan tetapi seperti pekerja tambang di Sheffield hingga nelayan yang tinggal di Blackpool. Perbedaan banyaknya pergerakan opini yang masuk ke daerah rural dan daerah urban di Inggris menandakan bagaimana perbedaan reaksi dan penerimaan terhadap budaya yang masuk. Muncullah sebuah bentuk 'liberalisme mayoritas' yang menekankan nilai liberalisme yang ada bukan berdasarkan dari kebebasan individu tapi menekankan kepada aspirasi. Ukuran bentuk liberalisme yang sesuai dari budaya demografis pihak mayoritas (Falkiner, 2016).

Semenjak mantan perdana menteri David Cameron mengeluarkan pernyataan bahwa multikulturalisme di Inggris gagal pada awal masa jabatannya di tahun 2011 (BBC, 2011). Isu multikulturalisme di Inggris menjadi sebuah pembahasan yang sering dijumpai di media dan masyarakat. Setelah bertahun-tahun yang lalu solusi yang diajukan oleh partai Buruh dalam menyelesaikan

permasalahan ini adalah pendekatan *laissez-faire*. *Laissez-faire* merupakan pendekatan pemerintah dengan membiarkan masyarakat menyesuaikan dan menyelesaikan sendiri permasalahan multikulturalisme yang ada secara natural. Setelah begitu lama penerapan pendekatan *laissez-faire* yang dilakukan kita akan menemukan terdapat sisi positif dan negatif. Secara positif semakin banyaknya pernikahan antar etnis dengan meningkatnya jumlah penduduk ras campuran secara perlahan. Secara negatif segregasi antar penduduk berdasarkan etnis masih terasa dan hal tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Inggris. Berbagai komunitas minoritas memiliki nilai yang jauh dari nilai umum kebudayaan Inggris. Hingga ketika masuknya konflik-konflik sektarian dari luar negeri ke dalam masyarakat Inggris ketika terjadinya kasus pembunuhan Asad Shah dikarenakan konflik sektarian antara Ahmadiyah dan Sunni. Pemerintah melihat metode otodidak tidak efektif (Akhtar, 2016).

BAB IV

TITIK TEMU PROSES KEMENANGAN KUBU SAYAP KANAN DI DALAM REFERENDUM *BREXIT*

Setelah membahas faktor ekonomi-politik beserta variabel yang ada di dalamnya. Kita akan memasuki *basic level* yang terdiri atas variabel utama. Terdapat dua variabel utama yang didapat setelah menggabungkan beragam variabel yang ada. Variabel yang pertama dalam hal ekonomi. Retorika politik sayap kanan terhadap masyarakat Inggris berbentuk keinginan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa demi bisa berdikari. Sehingga mendapatkan kebijakan perekonomian dapat dilakukan secara mandiri. Variabel kedua masuk ke dalam hal politik. Multikulturalisme menjadi isu sentral dalam pembahasan sosial kemasyarakatan. Arus imigrasi beserta budaya yang cepat menyebabkan paranoia dari masyarakat yang belum beradaptasi dengan globalisasi. Politisi sayap kanan menggiatkan politik identitas demi mendulang suara dan terbukti berpengaruh terhadap jalannya referendum.

IV.1 Kedaulatan Negara

Konsep negara kebangsaan merupakan konsep yang muncul berawal dari keinginan untuk diakhirinya Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci antara Katolik dan Protestan dengan Perjanjian Westfalen. Hasil dari perjanjian tersebut menjadi salah satu dasar terbentuknya konsep kedaulatan Westfalen yang digunakan oleh PBB sebagai standar sistem tata hubungan kenegaraan internasional pada masa kini. Prinsip dasar dari kedaulatan Westfalen adalah tidak diperbolehkannya intervensi dari luar terhadap yurisdiksi domestik lokal dan tiap negara baik besar maupun kecil mendapatkan

otoritas yang sama dalam kepemilikan hak kedaulatan. Secara sederhana konsep ini dapat dilihat sebagai prinsip kesetaraan hukum antarnegara dan prinsip non-intervensi. Melalui hal ini negara memiliki kedaulatan dalam hak penentuan nasib politik secara mandiri (Kissinger, 2014, pp. 23-30).

Konsep kedaulatan Westfalen mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan banyaknya negara yang memerdekakan diri dengan dasar atas nilai kebangsaan yang disatukan oleh bahasa dan negara. Perang dunia pertama menjadi sebuah simbol antara kekaisaran melawan nasionalisme dan hasil akhir dengan kemenangan kubu negara-negara nasionalis menyebabkan semakin kuatnya konsep kedaulatan Westfalen di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 intervensi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial terhadap negara-negara jajahan semakin berkurang dikarenakan meningkatnya tren ini. Negara yang berdaulat merupakan sebuah bentuk aspirasi dari perspektif organisatoris. Kedaulatan negara merupakan sebuah hasil dari kesadaran kolektif mengenai diperlukannya sebuah sistem dalam mengatur berbagai permasalahan yang dihadapi sebuah bangsa. Negara identik dengan ekonomi dikarenakan keduanya merupakan bentuk yang terstruktur dan kualitatif. Dalam mencari solusi dari permasalahan yang bersifat ekonomi. Peraturan yang sistematis terjadi sebuah dinamika yang dialami oleh dunia pada abad ke-21 (Kissinger, 2014, pp. 31-40).

Pada abad sebelumnya intensitas koneksi global tidak sederas sekarang. Negara akan lebih mudah dalam mengatur kebijakan yang dapat memprioritaskan internal masyarakat. Globalisasi muncul menyebabkan arus koneksi global semakin deras yang selaras dengan semakin majunya teknologi. Jika pada abad sebelumnya manusia butuh waktu berbulan-bulan untuk pergi dari satu tempat ke

tempat lainnya. Sekarang manusia bisa pergi dari satu tempat tempat yang lainnya dalam hitungan jam dengan menggunakan pesawat dan dalam hitungan detik bisa berkomunikasi antar benua dengan menggunakan internet.

Pengaruh dari globalisasi adalah kita semakin merasakan dunia yang tidak terbatas oleh batasan waktu dan jarak. Dengannya pergerakan komoditas maupun manusia menjadi sangat cepat sehingga menyebabkan seringnya pertemuan beragam teknologi hingga budaya yang digerakkan oleh arus perdagangan dan investasi dari berbagai belahan dunia berkumpul di dalam satu tempat. Salah satunya adalah kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Inggris dikarenakan Inggris tempat salah satu negara yang menjanjikan perekonomian yang baik. Meningkatnya tenaga kerja dari luar menyebabkan kondisi ketimpangan ekonomi internal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bagi masyarakat yang berpendidikan dan tinggal di kota besar tentu saja bisa menyesuaikan dengan dinamika globalisasi ekonomi yang ada. Begitu juga finansial pemerintah yang mendapatkan keuntungan melalui perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Akan tetapi bagi petani, peternak, nelayan dan berbagai kalangan buruh yang tidak mengikuti perkembangan isu secara cepat. Fokus pasar dari profesi mereka bersifat lebih ke lokal maka hal tersebut merugikan mereka (Kuepper, 2018).

Ketika melihat simbiosis antara Inggris dengan Uni Eropa dalam hal ekonomi dalam sektor yang makro Inggris mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Akan tetapi dalam sektor mikro pengaruh tersebut tidak dirasakan secara langsung. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran masyarakat menengah ke bawah Inggris sejak lama dan pada tahun 2014 hingga puncaknya tahun 2016 dengan hasil referendum *Brexit* politisi sayap kanan memanfaatkan keresahan

ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang kongsi pasarnya hanya melalui pasar lokal saja. Contoh dari para pedagang mikro tersebut adalah seperti petani apel, nelayan, dan buruh tambang yang tinggal jauh dari perkotaan. Mereka merasa bahwa kebijakan Uni Eropa beserta regulasinya tidak berpihak bagi kepentingan ekonomi langsung dari kehidupan mereka.

Keinginan sayap kanan untuk keluar dari Uni Eropa untuk membuat Inggris berdikari sehingga dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi secara mandiri senada dengan keinginan dari masyarakat menengah ke bawah yang tidak merasakan dampak ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa. Maka sering kali ketika kita melihat massa dari kampanye untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa dipenuhi oleh masyarakat rural yang tidak puas dengan hasil dari pasar lokal mereka dikarenakan tersaingi oleh hasil alam yang berasal dari negara lain di Uni Eropa yang lebih murah dan ekonomis dibandingkan produk yang dihasilkan oleh mereka.

Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa maka kesejahteraan bagi perekonomian mikro akan meningkat tergantung dari bentuk kesepakatan antara Inggris dengan Uni Eropa mengenai bentuk interaksi perdagangan yang akan dianut. Jika mengikuti pola *hard Brexit* maka aspirasi perlindungan ekonomi mikro akan dapat lebih bisa direalisasi dibandingkan dengan pola *soft Brexit* dikarenakan restriksi komoditas dari luar akan lebih ketat. Melalui *hard Brexit* Inggris dapat mencapai aspirasi dari politik sayap kanan sepenuhnya dalam melindungi perekonomian masyarakat yang mengandalkan perekonomian mereka melalui kongsi pasar lokal sehingga dapat membendung globalisasi ekonomi serta Inggris bisa menentukan kebijakan ekonomi secara mandiri.

IV.2 Konservasi Bangsa

Bangsa merupakan salah satu komponen penting dalam ruang lingkup sistem kenegaraan. Jika pemerintah merupakan sebuah bentuk dari konsep secara sistematis dalam menjalankan peran negara maka kebangsaan merupakan sebuah konsep kualitatif dalam mendefinisikan kehidupan dalam bernegara. Terdapat berbagai macam bentuk dari penafsiran dari nilai-nilai yang dijunjung dalam mendefinisikan bentuk dari konsep kebangsaan bagi tiap-tiap negara yang ada di dunia. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dialami oleh sebuah negara baik faktor internal maupun eksternal.

Terdapat lima faktor inti yang mendasari pembentukan karakter sebuah bangsa. Yang pertama adalah faktor primordial yang merupakan bentuk dari usaha memegang ikatan tradisi dan budaya yang ada dan sering kali berbentuk kesamaan bahasa dan pemikiran adat istiadat. Faktor kedua adalah faktor sakral yang didasari melalui kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat membentuk sebuah keterikatan yang kuat sehingga dapat membentuk sebuah bangsa. Selanjutnya faktor ketiga adalah faktor figur tokoh yang menjadi pemersatu bangsa dan dijadikan acuan dalam memandang bangsa sebagai satu kesatuan. Faktor keempat adalah faktor kesamaan sejarah yang dapat dilihat dari pengalaman masa lalu yang dialami oleh sebuah bangsa dan hal tersebut membentuk sebuah perjuangan dan pandangan yang sama dalam melihat bangsa. Terakhir adalah faktor kelima yang dilihat melalui perkembangan ekonomi. Ketika ekonomi berkembang maka semakin beragam pula bentuk kebutuhan masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dan tanpa disadari akan membentuk masyarakat sebagai jalan dalam

menjalankan perekonomian yang ada (Chotib, Suharno, Abubakar, & Catio, 2006, pp. 5-6).

Dalam melihat nilai kebangsaan yang dipegang oleh Inggris maka kita akan menemukan hal-hal yang sesuai dengan kelima faktor tersebut dalam menemukan bentuk nasionalisme dari Inggris. Melalui faktor primordial masyarakat Inggris memiliki disiplin bahasa yang sama yaitu bahasa Inggris serta kebudayaan yang sama yaitu *Victorian morality* dan saat ini semakin terasa menghilang dikarenakan semakin multikulturalnya komposisi masyarakat yang ada di Inggris. Pemerintah Inggris juga mempunyai kepercayaan resmi yaitu Kristen Anglikan yang berada di antara posisi teologi Lutheran dan Calvinisme sehingga sering disebut jalan tengah Protestan. Inggris juga mempunyai sederet tokoh yang menjadi cerminan dari kebudayaan bangsa dari ruang lingkup politik dan budaya seperti contohnya Elizabeth I, Winston Churchill hingga John Lennon. Sedangkan dalam perkembangan ekonomi bagi kalangan nasionalis umumnya melihat dari sejarah kejayaan Kekaisaran Inggris dengan luasnya teritorial persemakmuran dan bahkan menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan kenapa Inggris harus keluar dari lingkaran keanggotaan Uni Eropa.

Kubu sayap kanan sering kali menggunakan retorika nasionalis melalui nilai-nilai yang disebutkan di atas dalam menangani pencarian jawaban dari solusi permasalahan multikulturalisme. Multikulturalisme mempengaruhi nilai-nilai identitas yang ingin dikonservasi oleh masyarakat dengan semakin banyaknya budaya yang ada di masyarakat Inggris. Banyaknya pendatang dari luar negeri yang turut membawa budaya dan kebiasaan yang berasal dari negara-negara mereka. Umumnya imigran yang ada di Inggris berasal dari India, Polandia,

Bangladesh, Romania, Pakistan, Jamaika, Nigeria, Irlandia, dan Sri Lanka (Vargas-Silva & Rienzo, 2018).

Penanganan fenomena multikulturalisme di Inggris juga mengalami berbagai tahapan penyesuaian bentuk kebijakan yang dianggap sesuai dengan penanganan isu munculnya beragam budaya baru yang muncul di Inggris. Pada masa pemerintahan partai Buruh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani isu multikulturalisme menggunakan metode *organic integration* yang berdasarkan prinsip “peluang setara disertai oleh keberagaman kebudayaan di bawah naungan toleransi”. Dalam waktu jangka panjang dikarenakan kebijakan ini bersifat membiarkan masyarakat berkembang sendiri dalam menemukan jalan keluarnya atau yang dikenal dengan pendekatan *laissez-faire*. Menyebabkan tidak ditemukan titik kesamaan antara nilai tradisi yang sudah ada dengan beragam budaya yang datang. Komunitas-komunitas yang berkembang melalui nama multikulturalisme tanpa intervensi dari pemerintah. Membentuk sebuah komunitas yang jauh dari nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris. Nilai dasar yang dijunjung keumuman tradisi dari masyarakat Inggris adalah liberalisme (The Economist, 2016).

Umumnya komunitas yang memilih untuk mengisolir diri dari nilai tersebut memiliki dinamika interaksi yang jauh juga dari keumuman bentuk interaksi yang ada di masyarakat Inggris. Seperti ketika terjadinya kejadian kasus *Operation Trojan Horse* di Birmingham pada tahun 2014. *Operation Trojan Horse* merupakan sebuah skandal ditemukannya sebuah dokumen yang berisi mengenai rencana konspirasi untuk melakukan gerakan islamisasi di lingkungan sekolah yang ada di Inggris. Ketika berita tersebut menyebar menyebabkan reaksi

di berbagai kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya David Cameron yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri (Shackle, 2017).

Fenomena terasingnya komunitas-komunitas minoritas tersebut merupakan hasil dari segregasi yang terjadi dalam kurun waktu lama. Ketika kebijakan *laissez-faire* diterapkan dalam waktu yang lama tanpa adanya usaha pemerintah dalam mempertemukan berbagai komunitas yang ada menyebabkan jarangya interaksi antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya atau secara singkat kita dapat menyebut hal tersebut merupakan proses segregasi yang tidak direncanakan. Sering kali sebuah komunitas menempati tempat tertentu secara padat yang dipenuhi oleh lingkungan yang homogen. Seperti contohnya di beberapa kota seperti Leicester, Birmingham, Bradford, dan Manchester terdapat perkampungan yang ditempati dengan komposisi tiga perempat penduduknya warga minoritas dengan seperempatnya penduduk kulit putih. Perkampungan-perkampungan tersebut membentuk sebuah ekosistem yang terpisah dan tertutup dari nilai yang ada di masyarakat Inggris (Harrison, 2006).

Cameron mengeluarkan pernyataan bahwa menjaga anak-anak dari cengkeraman ideologi ekstrem merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Kasus ini mempertegas posisi Cameron yang sebelumnya pada tahun 2011 mengeluarkan pernyataan bahwa multikulturalisme telah gagal. Gagasan inti pada masa periode pemerintahannya adalah dengan menjalankan kebijakan *muscular liberalism* (Wright, 2011). Peran aktif dari pemerintah dibutuhkan dalam menangani kemungkinan adanya kelompok ekstremis. Bagi Cameron hal tersebut terjadi dikarenakan model *laissez-faire* yang sudah lama ditempuh oleh Partai Buruh menyebabkan segregasi antar komunitas. *Laissez-faire* menyebabkan

kurangnya peran masyarakat yang lebih memilih untuk menemukan jalan tengah antara budaya dengan nilai umum yang dianut oleh Inggris serta dominannya elemen yang menyuarakan untuk keeksklusifan dalam tiap komunitas.

Strategi Cameron berinti pada kendali pemerintah dalam hal pendidikan, jalur imigrasi, serta pembiayaan organisasi kemasyarakatan. Dibandingkan dengan membiarkan integrasi terjadi secara otodidak pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menemukan sebuah identitas yang homogen dalam bermasyarakat. Hanya organisasi dari komunitas yang percaya pada nilai-nilai kemanusiaan serta mempromosikan integrasi yang akan diberikan dorongan dana dari pemerintah. Menjelang periode kedua kepemimpinan Cameron isu mengenai ancaman ekstremisme merupakan salah satu hal yang sering dibahas dalam area publik. Posisi Cameron dalam memandang multikulturalisme tentunya tetap berpengaruh hingga pasca pengunduran dirinya. Era pembiaran dan memilih jalan natural dalam melakukan integrasi budaya berakhir berganti dengan munculnya intervensi pemerintah dalam penanganan mencari solusi dari multikulturalisme (McSmith, 2014).

Dorongan untuk melestarikan nilai dan identitas dalam menghadapi cepatnya imigrasi secara masal menjadi salah satu perhatian inti masyarakat Inggris dalam menghadapi referendum *Brexit*. Dalam istilah politik hal ini dikenal dengan *identity politics*. Politik dari *identity politics* mengarah ke preferensi politik yang sesuai dengan basis dari siapakah mereka dan grup mana tempat mereka tergolong. Identifikasi politik ini bertolak belakang dengan iklim klasik dari perpolitikan Inggris yang memfokuskan identifikasinya melalui kelas sosial, kepentingan ekonomi, dan spektrum ekonomi kiri-kanan.

Politik identitas sangat terikat dengan konsep *in-groups* dan *out-groups* yang secara sederhana memandang orang dalam versus orang luar. Ketika menggunakan cara pandang tersebut maka mulai muncul komparasi siapa yang merupakan bagian dari grup ini dan siapa yang bukan merupakan termasuk bagian di dalamnya. *Englishness* menjadi faktor penting di dalam partai sayap kanan menggerakkan masyarakat untuk memilih keluar dari Uni Eropa. Nilai yang didasarkan kesatuan nasional yang didasari *identity politics* secara langsung merupakan sebuah kekuatan yang tampak kasat mata namun benar adanya. Faktor ini selain dari faktor ekonomi merupakan faktor yang penting mengingat sebagian besar dorongan pemilih yang memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa melihat bahwa nilai dan budaya Inggris terancam. Para politisi sayap kanan menyadari akan bangkitnya bentuk perpolitikan baru di Inggris dengan audiensi yang mulai menanamkan sebuah jarak antara siapa yang merupakan bagian dari *Englishness* dan siapa yang bukan. Siapa yang mengikuti *British values* dan siapa yang tidak (Heath & Richards, 2018).

Kampanye yang dilakukan sayap kanan dalam mengombinasikan elemen identitas dengan keresahan ekonomi mengalami hasil. Isu yang sebelumnya hanya berbicara mengenai bea cukai, perdagangan bebas dan regulasi hukum secara periferi menjadi isu yang berkaitan dengan identitas. Dari yang sebelumnya hanya mengeluarkan pernyataan ‘apa?’ menjadi ‘siapa?’ dalam menentukan preferensi politiknya. Hal ini dibuktikan dengan berbanding lurusnya seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang *English* dibandingkan dengan sebagai seorang *Britons* dengan preferensi pemilih *leave*. Persentase pemilih yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa sangat terkait dengan bagaimana cara

mereka mengidentifikasi pilihan politik identitas mereka. Ketika kita melihat jalan politik dari sayap kanan yang ada Inggris terdapat spektrum antara yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai warga *United Kingdom* dan mereka yang lebih melihat posisi sebagai orang Inggris. Bagi kubu sayap kanan sentris seperti partai Konservatif tentu jalan *soft Brexit* lebih menjadi pilihan yang disukai dikarenakan sentimen yang menjadi perhatian lebih ke arah ekonomi dan hukum. Sedangkan jalan pilihan dari kubu sayap kanan ekstrem sentimen ekonomi dan regulasi didampingi dengan sentimen identitas menghasilkan *hard Brexit*. Sebanyak 60% memilih untuk tidak adanya regulasi hukum Uni Eropa terhadap Inggris atas dasar identitas komunal *Englishness*.

Preferensi Identitas terhadap Isu Referendum *Brexit*, %

	Britania Raya Keseluruhan	Hanya Inggris Saja
■ Tidak Ada Peran Uni Eropa dalam Pembuatan Undang-Undang di Inggris	46	60
■ Perbatasan dengan Irlandia Harus Tetap 'Lunak'	34	32
■ Pergerakan Bebas Harus Diberhentikan	27	39
■ Warga Inggris di Uni Eropa Harus Memiliki Hak yang Sama	43	46
■ Inggris Harus Memiliki Akses Penuh ke Pasar Uni Eropa	31	32
■ Kolaborasi Sainifik Harus Berlanjut	35	32
■ Tidak Ada Iuran Lagi ke Depan	44	58
■ Inggris Harus Dibebaskan dalam Melakukan Perjanjian Dagang	49	63

Grafik 4.1

Preferensi Identitas terhadap Isu Referendum *Brexit*, (Sumber: Heath & Richards, 2018)

Dihentikannya pergerakan bebas manusia dan komoditas juga menjadi alasan yang cukup tinggi yang disebabkan karena politik identitas. Sebanyak 39% memilih untuk tidak adanya *free movement* atas dasar preferensi etnis Inggris. Begitu juga dalam persoalan pemberhentian anggaran iuran Inggris di Uni Eropa dan keinginan Inggris dalam membuat kesepakatan dagang secara mandiri. Masing-masing persentasenya sebanyak 58% dan 63%. Kedua persentase tersebut juga menempati posisi tertinggi dari pilihan yang didasari oleh sentimen etnosentrisme (Richards, Heath, & Carl, 2018, pp. 280-290).

BAB V

KESIMPULAN

Dinamika faktor ekonomi dan faktor politik memberi andil yang besar dalam menciptakan reaksi perpolitikan yang berorientasi kanan di dalam masyarakat Inggris. Kemenangan dari kubu *leave* pada referendum *Brexit* di tahun 2016 menjadi layaknya sebuah bom waktu yang muncul dikarenakan orientasi politik global yang berubah. Jika pada tahun 1990-an pembicaraan politik masih seputar spektrum dalam hal pengaturan ekonomi maka pasca 9/11 dan krisis ekonomi tahun 2008 pembicaraan tersebut berubah. Konsensus dari bentuk liberalisme yang menjadi standar ideologi dunia pasca runtuhnya Uni Soviet menjadi diperdebatkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan munculnya rasa ketidakamanan dalam hal perekonomian dan kebudayaan.

Referendum *Brexit* merupakan cerminan dari rasa ketidakamanan yang menjadikan politik sayap kanan sebagai panglima dalam jalan menolak institusi supra-nasional. Uni Eropa dianggap melakukan *overlap* dalam melakukan intervensi kekuasaan yang seharusnya berada langsung di tangan pemerintahan Inggris. Regulasi hukum yang berada di Brussels sering kali merugikan London dikarenakan tidak efektifnya sistem. Bebasnya pergerakan manusia di bawah aturan imigrasi Uni Eropa menyebabkan banyak imigran yang menempuh jalan pintas demi bisa tinggal di Inggris. Sebagai contoh dengan mengajukan diri sebagai warga negara yang memiliki regulasi longgar dalam peraturan imigrasinya dan pindah ke Inggris setelah memegang paspor Uni Eropa. Selanjutnya Inggris mengalami kerugian ekonomi dalam sektor mikro dikarenakan bentuk perjanjian dagang yang disupervisi oleh Uni Eropa. Sektor

mikro berpengaruh besar dikarenakan merupakan sektor yang paling dirasakan oleh masyarakat luas. Pengalokasian biaya untuk iuran sebagai anggota dari Uni Eropa menjadi hal yang sering dipertanyakan. Walaupun hal tersebut secara matematis tidak merugikan akan tetapi oleh politisi sayap kanan sering dimanfaatkan dikarenakan secara nyata mengurangi neraca anggaran Inggris. Serta anggapan bahwa Inggris tidak mempunyai tempat yang seharusnya menjadi standar dalam berinteraksi dengan Uni Eropa. Paranoia akan hilangnya kedaulatan dalam menjalankan alur pemerintahan juga menjadi faktor menjadi munculnya anggapan tidak dihargainya Inggris sebagai anggota Uni Eropa. Situasi perpolitikan di Inggris pra-referendum di tahun 2014 hingga 2016 merupakan salah satu contoh yang muncul dari rasa ketidakamanan tersebut. Proses ini akan sering kita temui di dalam dunia pasca-liberalisme sebagai puncak dari pengaruh globalisasi. Kekuatan teknologi internet beserta transportasi modern memberi andil membentuk tatanan dunia global. Melalui teknologi transportasi modern kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang jauh secara singkat. Melalui internet kita dapat menyampaikan aspirasi politik ke publik tanpa memerlukan kesulitan teknis. Maka kemunculan kekuatan pemimpin politik berhaluan populis-nasionalis di Inggris secara spontan merupakan hasil dari kemajuan teknologi.

Politik yang didasari oleh konflik sosial akan cepat menyebar dan hal ini dimanfaatkan para politisi sayap kanan Inggris. Partai yang mayoritas dan sudah lama memegang pemerintahan akan memilih untuk masuk ke spektrum politik sentris dalam rangka mengakomodasi keinginan masyarakat. Partai yang anti dengan para elite dan institusi pemerintah akan mengombinasikan jalan sayap kanan ekstrem dalam menghadapi isu mengenai imigrasi dan identitas dan kendali

negara secara langsung dalam mengatur kesejahteraan dan ekonomi. Perdebatan antara *establishment* dengan *anti-establishment* menjadi topik hangat dalam dinamika dunia pada saat ini. Masyarakat dituntut untuk melihat bahwa pemerintah dianggap tidak dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan bersama. Pengaruh dari urgensi keinginan untuk mengontrol ‘kembali’ ekonomi dan politik di Inggris merupakan salah satu bentuk interaksi antara *establishment* dan *anti-establishment*. Hal ini menyebabkan sebuah anomali politik yang menghasilkan hasil yang di luar dugaan para ahli. Inggris yang terkenal dengan pendekatan politik melalui disiplin ilmiah serta kebijakan berubah ke arah pilihan yang sarat dengan romansa identitas dan unsur emosional. Kemenangan politik sayap kanan merupakan kombinasi antara kecemasan masyarakat Inggris di dunia *post-liberalism* dan kecakapan para pemimpin politik sayap kanan dalam memberikan sarana kecemasan tersebut menjadi sebuah suara di referendum *Brexit* (Milbank & Pabst, 2016, pp. 11-90).

Brexit merupakan titik dalam sejarah dunia yang menjembatani tatanan dunia liberal yang diisi oleh prinsip kosmopolitan dan ekonomi global menuju tatanan dunia pasca-liberalisme. Tatanan dunia pasca-liberalisme dapat terbentuk menjadi dua hipotesis secara garis besar. Bisa menjadi semakin terintegrasinya tatanan dunia global menjadi tatanan monokultur atau bisa menjadi dunia yang mengombinasikan nativisme dan patriotisme dengan pandangan internasionalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- March, L. (2017). Left and right populism compared: The British case. *The British Journal of Politics and International Relations* , 19 (2), 282-300.
- Lazer, H. (1976). British Populism: The Labour Party and the Common Market Parliamentary Debate. *JSTOR* , 91 (2), 259-277.
- Thurlow, R. C. (2010). Racial populism in England. *Patterns of Prejudice* , 10 (4), 27-33.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: a very short introduction*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1-20.
- Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2008). *Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy*. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 166-180, 119-134, 181-197.
- Lochoki, T. (2017). *The Rise of Populism in Western Europe: A Media Analysis on Failed Political Messaging*. Berlin, Germany: Springer, 40-46.
- Casey, T. (2011). *Legacy of the Crash: How the Financial Crisis Changed America and Britain*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 40-45, 139-156.
- Thompson, J. L. (2015). *A Wider Patriotism: Alfred Milner and the British Empire*. Abingdon: Routledge, 107-121
- Aughey, A. (2001). *Nationalism, Devolution and the Challenge to the United Kingdom State* . London: Pluto Press, 153-167.
- Goulbourne, H. (1991). *Ethnicity and Nationalism in Post-Imperial Britain*. Cambridge: Cambridge University Press, 87-125. 234-242.
- Goodwin, M., & Milazzo, C. (2015). *UKIP : inside the campaign to redraw the map of British politics*. Oxford: Oxford University Press, 104-105.
- Parekh, B. (2002). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* . Harvard: Harvard University Press, 50-75.
- Pitcher, B. (2009). *The Politics of Multiculturalism: Race and Racism in Contemporary Britain*. Berlin: Springer, 163-177.
- Fukuyama, F. (2018). The Rise of Populist Nationalism. *The Future of Politics* , 7-13.
- Cresswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE, 183-214.
- Schaffer, G. (2006). Re-Thinking the History of Blame: Britain and Minorities during the Second World War. *National Identities* , 8, 401-419.

- Hameleers, M., Bos, L., & de Vreese, C. H. (2017). "They Did It": The Effects of Emotionalized Blame Attribution in Populist Communication. *Communication Research* , 44, 870-900.
- Rader, B. G. (2006). *American Ways: A History of American Culture 1865-Present*. Wadsworth Press, 189-388.
- Baggini, J. (2013). *A very British populism*. Counterpoint, 27-32.
- Goertz, G., & Mahoney, J. (2006). *Social science concepts: a user's guide*. Princeton: Princeton University Press, 247-266.
- Evans, R. J. (2003). *The Coming of the Third Reich*. New York: Penguin Press, 150.
- Gifford, C. (2006). The rise of post - imperial populism: The case of right - wing Euroscepticism in Britain. *European Journal of Political Research* , 45 (5), 851-869.
- Glencross, A. (2016). *Why the UK Voted for Brexit: David Cameron's Great Miscalculation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, 1-6.
- Melchior, A. (2018). *Free Trade Agreements and Globalisation: In the Shadow of Brexit and Trump*. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 30-31.
- Soffer, R. N. (2009). *History, Historians, and Conservatism in Britain and America: The Great War to Thatcher and Reagan*. New York: Oxford University Press, 19-23.
- Stern, P. J., & Wennerlind, C. (2014). *Merchantilism Reimagined: Political Economy in Early Modern Britain and Its Empire*. New York: Oxford University Press, 31-34.
- Kissinger, H. (2014). *World Order*. New York: Penguin Press, 23-30, 31-40.
- Chotib, M. D., Suharno, T., Abubakar, S., & Catio, M. (2006). *Kewarganegaraan 1 menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira, 5-6.
- Richards, L., Heath, A., & Carl, N. (2018). Nationalism, racism, and identity: what connects Englishness to a preference for hard Brexit? *The Political Quarterly* , 89 (2), 280-290.
- Milbank, J., & Pabst, A. (2016). *The Politics of Virtue: Post-liberalism and the Human Future*. London: Rowman & Littlefield International, 11-90.

Laman Internet

- Nolen, J. L., Munro, A., Gaur, A., & Ray, M. (2010, February 11). *Populism, Political Program or Movement*. Dipetik May 24, 2018, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/populism>

- Hunt, A., & Wheeler, B. (2018, May 10). *Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU*. Dipetik May 24, 2018, dari BBC: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>
- Foster, A. (2017, July 20). *What is the UK's EU rebate? The UK rebate and the EU budget explained*. Dipetik May 24, 2018, dari Express: <https://www.express.co.uk/news/politics/831116/UK-rebate-EU-what-is-contribution-European-Union-budget-explained>
- Amadeo, K. (2018, April 27). *The Great Recession of 2008 Explained with Dates*. Dipetik May 29, 2018, dari Balance: <https://www.thebalance.com/the-great-recession-of-2008-explanation-with-dates-4056832>
- Ozimek, A. (2016, June 25). *Blaming Elites For The Rise Of Populism*. Dipetik September 8, 2018, dari Forbes: www.forbes.com/sites/modeledbehavior/2016/06/25/blaming-elites-for-the-rise-of-populism/amp/
- Callahan, G. (2016, November 28). *What Is 'Ethno-Nationalism'?* Dipetik September 9, 2018, dari The American Conservative: <https://www.theamericanconservative.com/articles/what-is-ethno-nationalism/>
- Crossland, D. (2017, August 16). *How Germany Combats Far-Right Extremism*. Dipetik September 9, 2018, dari Handelsblatt Global: <https://global.handelsblatt.com/politics/how-germany-combats-far-right-extremism-812883>
- Lester, T. (2011, November 21). *Many similarities in Arab Spring, European chaos*. Dipetik November 14, 2018, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2011/11/21/world/europe/arab-spring-europe/index.html>
- Johnson, B. (2018, July 9). *Boris Johnson's resignation letter and May's reply in full*. Dipetik December 2, 2018, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-44772804>
- Tobin, D. (2018, January 31). *Why the UK won't get a better trade deal with China outside the EU*. Dipetik December 2, 2018, dari The Conversation: <http://theconversation.com/why-the-uk-wont-get-a-better-trade-deal-with-china-outside-the-eu-90981>
- Bulman, M. (2016, September 11). *Brexit: Vote Leave camp abandon £350m-a-week NHS vow in Change Britain plans*. Dipetik September 3, 2018, dari The Independent: <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-nhs-350m-a-week-eu-change-britain-gisela-stuart-referendum-bus-a7236706.html>
- Reddy, A. (2016, July 10). *How Brexit Was Also A Struggle Between British Common Law And Laws Of EU*. Dipetik December 2, 2018, dari Swarajya

Mag: <https://swarajyamag.com/world/how-brexit-was-also-a-struggle-between-british-common-law-and-laws-of-eu>

Merriam, G., & Webster, N. (1961). *Globalization | Definition of Globalization by Merriam-Webster*. Dipetik December 3, 2018, dari Merriam-Webster: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/globalization>

Dannreuther, C., Lavery, S., & Quaglia, L. (2018). The Political Economy of Brexit and the Future of British Capitalism Second Symposium. *New Political Economy*, 1-4.

Stone, J. (2016, August 25). *What Theresa May said about immigration in her infamous speech to Tory conference*. Dipetik December 3, 2018, dari The Independent: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-immigration-policies-speech-conference-2015-tory-conservative-party-views-a7209931.html>

Speed, B. (2016, June 24). *How did different demographic groups vote in the EU referendum?* Dipetik December 2, 2018, dari The Guardian: <https://www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum>

The Economist. (2015, April 25). *Europe's boat people*. Dipetik December 3, 2018, dari The Economist: <https://www.economist.com/leaders/2015/04/25/europes-boat-people>

The Economist. (2016, February 24). *A background guide to "Brexit" from the European Union*. Dipetik December 3, 2018, dari The Economist: <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/02/24/a-background-guide-to-brexit-from-the-european-union>

Full Fact Team. (2018, December 3). *The UK's EU membership fee*. Dipetik December 3, 2018, dari Full Fact: <https://fullfact.org/europe/our-eu-membership-fee-55-million/>

UK in a Changing Europe Fellows. (2016, April 25). *EU facts behind the claims: UK influence*. Dipetik December 3, 2018, dari Full Fact: <https://fullfact.org/europe/eu-facts-behind-claims-uk-influence/>

Iyadjiev, I. (2016, July 22). *The past, present and future of globalisation: Brexit in one chart*. Dipetik December 4, 2018, dari Reaction: <https://reaction.life/the-past-present-and-future-of-globalisation-brexit-in-one-chart/>

Oxford Dictionary. (1989). *Definition of multiculturalism in English by Oxford Dictionaries*. Diambil kembali dari Oxford Dictionary: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/multiculturalism>

The Economist. (2016, February 24). *The Economist*. Dipetik January 2, 2019, dari A background guide to "Brexit" from the European Union:

<https://www.economist.com/graphic-detail/2016/02/24/a-background-guide-to-brex-it-from-the-european-union>

- Sampson, T. (2017, November 1). *Brexit and the future of globalisation*. Dipetik January 2, 2018, dari UK in a Changing Europe: <http://ukandeu.ac.uk/brexit-and-the-future-of-globalisation/>
- Barker, A. (2016, July 6). *The soft-Brexit Chequers deal: what it means*. Dipetik January 2, 2019, dari The Financial Times: <https://www.ft.com/content/aeb53c82-82ac-11e8-96dd-fa565ec55929>
- Rodrik, D. (2013, May 3). *The 'Trilemma' of Globalisation*. Dipetik January 2, 2019, dari Blavatnik School of Government: <https://www.bsg.ox.ac.uk/news/trilemma-globalisation>
- Helm, T. (2018, February 24). *As Corbyn shifts Labour towards soft Brexit, Tory jitters grow*. Dipetik January 2, 2019, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/24/jeremy-corbyn-shifts-labour-soft-brexit>
- Herszenhorn, D. (2018, December 19). *EU's hard Brexit is going to hurt — a lot*. Dipetik January 2, 2019, dari Politico: <https://www.politico.eu/article/eu-hard-brexit-is-going-to-hurt-a-lot-no-deal-theresa-may-uk/>
- KnowledgeHub. (2018, December 9). *Nothing Defines the 2010's*. Dipetik January 2, 2019, dari KnowledgeHub: <https://youtu.be/EEJyPSId2MU>
- Falkiner, D. (2016, May 29). *Book Review: The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights by Liav Orgad*. Dipetik January 2, 2019, dari London School of Economics: <http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/book-review-the-cultural-defense-of-nations-a-liberal-theory-of-majority-rights-by-liav-orgad/>
- Akhtar, P. (2016, Oktober 11). *Is Muslim sectarian violence a new reality for Britain?* Dipetik January 12, 2019, dari The Conversation: <https://theconversation.com/is-muslim-sectarian-violence-a-new-reality-for-britain-66248>
- Kuepper, J. (2018, November 19). *The Impact of Globalization on Economic Growth*. Dipetik January 12, 2019, dari The Balance: <https://www.thebalance.com/globalization-and-its-impact-on-economic-growth-1978843>
- BBC. (2011, February 5). *State multiculturalism has failed, says David Cameron*. Dipetik January 12, 2019, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994>
- Vargas-Silva, C., & Rienzo, C. (2018, October 15). *Migrants in the UK: An Overview*. Dipetik January 16, 2019, dari The Migration Observatory:

<https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/>

- The Economist. (2016, May 21). *Integration nation*. Dipetik January 17, 2019, dari The Economist:
<https://www.economist.com/britain/2016/05/21/integration-nation>
- Shackle, S. (2017, September 1). *Trojan horse: the real story behind the fake 'Islamic plot' to take over schools*. Dipetik January 17, 2019, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/01/trojan-horse-the-real-story-behind-the-fake-islamic-plot-to-take-over-schools>
- Wright, O. (2011, February 5). *Cameron: My war on multiculturalism*. Dipetik January 17, 2019, dari The Independent:
<https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html>
- McSmith, A. (2014, June 9). *PM threatens snap Ofsted inspections over 'Trojan Horse' affair*. Dipetik January 17, 2019, dari The Independent:
<https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/pm-threatens-snap-ofsted-visits-over-trojan-horse-affair-9510053.html>
- Harrison, D. (2006, October 8). *Government policy on multiculturalism has been left in tatters* . Dipetik January 17, 2019, dari The Telegraph:
<https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1530876/Government-policy-on-multiculturalism-has-been-left-in-tatters.html>
- Heath, A., & Richards, L. (2018, Oktober 3). *Nationalism, racism, and identity: what connects Englishness to a preference for hard Brexit?* Dipetik January 20, 2019, dari London School of Economics and Political Science:
<http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/englishness-racism-brexit/>